

Andrik Purwasito



# NANO POWER DIPLOMACY

Study about Non-State Actors

**NANO POWER**

**DIPLOMACY**

**Study about Non-state Actors**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Andrik Purwasito

**NANO POWER  
DIPLOMACY**  
Study about Non-state Actors

**UNS PRESS**

**NANO POWER DIPLOMACY**  
**Study about Non-state Actors**  
Hak Cipta© Andrik Purwasito. 2021

**Penulis**

Andrik Purwasito

**Editor**

Erwin Kartinawati

**Ilustrasi Sampul**

UNS PRESS

**Penerbit & Percetakan**

Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press)  
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126  
Telp. (0271) 646994 Psw. 341 Fax. 0271 7890628  
*Website* : [www.unspress.uns.ac.id](http://www.unspress.uns.ac.id)  
*Email* : [unspress@uns.ac.id](mailto:unspress@uns.ac.id)  
Cetakan pertama, Edisi I November 2021  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
*All Rights Reserved*

**ISBN 978-602-397-569-3**

## PRAKATA

Pandemi global akibat virus covid-19 menyebabkan perubahan besar pada seluruh sektor hidup masyarakat, tak terkecuali dalam bidang atau praktik diplomasi. Praktik diplomasi sebagai urat nadi dalam hubungan dan politik internasional, turut melakukan adaptasi dan inovasi sehubungan dengan pandemi covid-19. Dalam situasi pandemi global, Bjola (2021) menyebut bahwa penelitian diplomasi menempati posisi yang sangat penting. *There are many very good reasons to study diplomacy right now*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pandemi covid-19 secara radikal mengubah *platform* diplomasi tradisional menuju praktik diplomasi digital. Termasuk pola dan tata cara berdiplomasi dan sekaligus konten diplomasi juga membutuhkan kemasan yang baru.

Dalam riset ini, kami tidak membahas tentang peran dan aktivitas *non state actors* yang berskala besar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan International Non-governmental Organization (IGO) serta Perusahaan multinasional (MNC), tetapi lebih memfokuskan diri pada aktivitas aktor non-negara yang terkecil (nano elemen) dalam konteks migrasi dari *platform off-line to platform on-line*. Termasuk juga mengetengahkan tentang perubahan paradigma hubungan internasional dan konseptualisasi (dasar teoritik dan filosofis) Nano *Power Diplomacy*. Oleh sebab itulah buku ini berjudul Nano *Power Diplomasi: Migrasi diplomasi platform off-line ke diplomasi platform on-line*. Buku ini merupakan produk luaran dari hasil riset penelitian dasar yang didanai Ristek Dikti tahun 2021 dan 2022. Fokus kajian buku ini adalah tentang bagaimana diplomasi digital memainkan peran besar dalam menjangkau publik internasional, yang terbagi atas tiga kategori seperti di bawah ini, yakni :

1. Bagaimana pergeseran hubungan internasional memengaruhi peran dan kerjasama antara *state actors* dan *non state actors* dalam diplomasi?
2. Bagaimana basis konseptualisasi Nano *Power Diplomacy* digali

sebagai pijakan teoritis?

3. Bagaimana aktivitas migrasi diplomasi yang dilakukan oleh aktor individu dari *off-line* ke diplomasi *on-line*? (Untuk pertanyaan ketiga akan diteliti pada tahun kedua atau tahun 2022).

Bahasan di atas diperoleh dari fakta internasional yang menunjukkan telah terjadinya, pertama, pergeseran paradigma hubungan internasional dari dominasi negara ke ranah publik. Konsep diplomasi baru tersebut disebut dengan sembilan jalur diplomasi (*multitrack diplomacy*). Fakta kedua dari situasi internasional adalah kehadiran teknologi internet dalam era pandemi covid-19 yang telah memfasilitasi aktor diplomasi untuk menjalankan praktik diplomasi secara daring. Hal itu jelas karena dampak dari penerapan protokol kesehatan di masa pandemi, yakni imbauan untuk menjaga jarak dan menghindari kontak fisik secara langsung. Dengan begitu, pandemi covid-19 telah mengubah tata cara dan tata kelola politik internasional dan diplomasi dari *platform on-site* (luring), menjadi *platform* relasi *on-line* (daring).

Dalam relasi daring, buku ini telah menemukan proses diplomatik dan hubungan internasional yang lebih terbuka dan langsung. Hal ini sangat berbeda ketika diplomasi dilakukan secara luring, yang sering disebut sebagai diplomasi tertutup dan bersifat rahasia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan yang revolusioner, dalam bentuk tuntutan praktik diplomasi yang lebih transparan dan akuntabel. Buku ini juga menengahkan tentang konseptualisasi *Nano Power Diplomacy* sebagai tuntutan karya akademik. Pertama, adanya perubahan paradigma internasional, sebagaimana disebut oleh Rosenau (1990) bahwa abad ke 21 struktur otoritas lama melemah dan terpecah menjadi kolektivitas aktor. Perubahan tersebut terlihat bahwa pada tingkat mikro. Subkelompok menjadi lebih kuat dan kelompok mikro memainkan peran secara mandiri. Transformasi dan dinamika yang berkejolak pada era millenium ini telah mendorong kecenderungan bergantinya sentralisasi *power* dan kecenderungan terjadinya disentralisasi pada struktur aktor internasional, khususnya aktor non-negara. Sebagaimana disampaikan oleh Dubes RI untuk Ethiopia, Al Busyra Basnur, dalam *forum group discussion* yang kami gelar pertengahan 2021 lalu, aktivitas diplomasi

80 persennya justru dijalankan oleh aktor non-negara, dan 20 persen sisanya dijalankan oleh aktor negara. Pernyataan tersebut memertegas bahwa peranan aktor non negara dalam diplomasi modern sangat signifikan. Situasi tersebut dipertegas oleh Louise Diamond dan John McDonald (2016) yang telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa peran aktor non negara mempunyai kontribusi besar dalam diplomasi dan hubungan internasional.

Posisi *Nano Power Diplomacy* secara teoritik terletak pada jalur ke 4 (empat) yakni jalur privat *citizen*. Adapun basis paradigmatic jalur privat *citizen* tersebut lebih dekat dengan konstruktivisme, yakni praktik hubungan internasional yang bersumber dari latar sosial-budaya bangsa. Sedangkan basis legal *Nano Power Diplomacy* ini bersumber dari dasar negara RI yaitu Pancasila, dan secara sosial bersumber pada falsafah budaya Jawa, yakni *Mamayu hayuning bawana*. Falsafah tersebut secara umum dapat dijabarkan sebagai upaya “memercantik dunia” melalui penghormatan terhadap perbedaan, siap sedia berbagi nilai dan pengalaman (*share of values dan share of experiences*), menjamin hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*). Dalam falsafah *Mamayu hayuning bawana* setidaknya ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yakni kemauan (1) menjaga survivalitas peradaban secara bersama dengan memelihara solidaritas dan persaudaraan global. (2). Membangun kebersamaan dalam perbedaan melalui semangat kekeluargaan global berdasar atas kemandirian atau *self sufficiency*. (3). Menjalin kekeluargaan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dari apa yang kami paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa aktor non negara semakin mendapatkan perhatian dari akademisi hubungan internasional. Aktor non negara berskala individu yang menjadi fokus riset ini merupakan pengembangan lebih jauh tentang peran jalur privat, yang kami sebut sebagai *Nano Power Diplomacy*. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami secara komprehensif tentang praktik diplomasi total yang notabene dijalankan oleh Republik Indonesia. Dengan kata lain bahwa riset diplomasi individu ini secara akan membantu negara dalam mencapai kepentingan nasional secara optimal, meski dalam banyak hal, institusi diplomatik tradisional (negara) masih memertahankan monopoli kebijakan luar negeri. Namun begitu, aktor non negara



tetap memainkan peran kontributif baik dalam kepentingan periferal maupun kepentingan sekunder.

Terimakasih kepada Ristek Dikti yang telah membiayai penerbitan buku ajar ini sebagai luaran dari skim penelitian dasar tahun 2021. Terimakasih pula saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang memberikan kontribusi dalam penulisan buku ini baik *state* maupun *non state actors* yakni duta besar RI untuk Nairobi Kenya sekaligus merangkap Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan perwakilan tetap untuk United Nations Environment Programme (UNEP) dan UN Habitat, Hery Saripudin. Narasumber kedua yakni Duta Besar Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan, yang juga merangkap untuk Botswana, Eswatini, dan Lesotho, Salman Al Farisi. Narasumber ketiga yaitu Duta besar RI di Addis Ababa, Ethiopia, yang juga merangkap di Republik Djibouti dan Uni Afrika, Al Busyra Basnur. Narasumber lainnya adalah mantan Duta Besar RI untuk tahta suci Vatikan, A. Agus Sriyono, Konsulat Jenderal New Caledonia Widyarka Ryananta, mahasiswa Indonesia di Sofia Faiz Ahadania, para seniman dan praktisi yang telah melanglang buana ke luar negeri antara lain seniman dan ahli keris Basuki Teguh Yuwono, seniman tari Hary Genduk, Prof. Dwi Maryanto, Prof. Suminto A Sayuti, Prof. Suwardi Endraswara, serta para narasumber dan pihak yang memberikan kontribusi lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhir kata, tulisan ini memang belum sempurna karena memang belum sepenuhnya selesai (1 dari 2 tahun). Di tahun pertama tulisan kami arahkan pada basic teori tentang nano power diplomacy sebagai pengantar untuk bahasan di tahun kedua mengenai pratik migrasi dari off-line ke on-line yang dilakukan oleh netizen. Kritik dan saran dapat disampaikan ke email [andrikpurwasito@staff.uns.ac.id](mailto:andrikpurwasito@staff.uns.ac.id).

## DAFTAR ISI

PRAKATA	_____	v
DAFTAR ISI	_____	ix
BAB I.	PENDAHULUAN _____	1
	A. Latar Belakang _____	1
	1. Urgensi Penelitian _____	1
	2. Diplomasi <i>Platform</i> Digital _____	1
	3. Rumusan Masalah _____	10
	B. Tujuan dan Manfaat _____	10
	C. Metode Penelitian _____	11
	1. Literature Review _____	11
	2. Pengumpulan Data _____	12
	3. Analisis Data _____	13
	4. Operasionalisasi _____	13
BAB II.	HUBUNGAN INTERNASIONAL DI MASA PANDEMI GLOBAL COVID-19 _____	15
	A. Diplomasi dalam <i>New Normal</i> _____	16
	B. Meningkatnya Peran Media Sosial _____	17
	C. Resume dan Evaluasi _____	18
	D. Pertanyaan Latihan _____	18
BAB III.	KONSEPTUALISASI <i>NANO POWER</i> <i>DIPLOMACY</i> _____	20
	A. Jalur Diplomatik, Dasar Filosofis-Ideologis dan Diplomasi Indonesia _____	20
	1. Posisi <i>Nano Power Diplomacy</i> dalam Sembilan Jalur Diplomasi _____	20

	2. Dasar Filosofis dan Ideologis _____	26
	3. Sejarah Singkat Diplomas Indonesia _____	28
	4. <i>Nano Power Diplomacy</i> dalam Diplomas Indonesia _____	31
B.	Terminologi _____	33
	1. Diplomas _____	33
	2. Nano _____	34
	3. <i>Power</i> _____	35
C.	<i>Nano Power Diplomacy</i> _____	38
	1. Pergeseran Diskursus Dari <i>State Actors to Non-State Actors</i> _____	38
	2. <i>Soft Power</i> dan <i>Non State Actors</i> _____	44
	3. <i>Nano Power Diplomacy</i> _____	48
	4. Desain Diplomas Nano _____	49
E.	Resume dan Evaluasi _____	51
F.	Pertanyaan Latihan _____	51
BAB. IV	MIGRASI PRAKTIK <i>NANO POWER DIPLOMACY</i> : Dari Diplomas <i>Platform Off-line</i> ke Diplomas <i>Platform On-line</i> _____	51
	A. <i>Nano Power Diplomas</i> dalam Konteks Diplomas Budaya _____	54
	B. <i>Nano Power Diplomacy</i> dalam Praktik Diplomas <i>Platform Off-line</i> _____	58
	C. <i>Nano Power Diplomacy</i> dalam Praktik Diplomas <i>Platform On-line</i> _____	60
BAB IV.	EPILOG _____	73
	DAFTAR PUSTAKA _____	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi virus korona telah melanda dunia. Hampir seluruh bangsa terdampak bahkan ada yang hingga pada tahap mengerikan. Peradaban dunia kini telah benar-benar diuji secara kritis terhadap dampak pandemi virus tersebut. Pada satu sisi pandemi global menyebabkan perubahan besar pada seluruh sektor hidup masyarakat, tak terkecuali dalam hubungan internasional dan praktik diplomasi. Seperti kita ketahui bahwa diplomasi adalah urat nadi dalam politik internasional yang mengalami perubahan radikal untuk melakukan adaptasi dan inovasi dalam mengatur dan mencapai kepentingan nasional. Pada sisi lainnya, tragedi tersebut telah membangkitkan kebersamaan dalam membangun keselamatan dan keamanan bersama, termasuk dunia diplomasi. Maka tidak mengherankan secara tiba-tiba pelaksanaan pertemuan, konferensi, perundingan internasional baik bilateral maupun multilateral berubah tata cara dan tata kelola relasi, melalui relasi virtual.

#### 1. Urgensi Penelitian

Penelitian diplomasi saat ini menempati posisi yang sangat penting. *There are many very good reasons to study diplomacy right now* (Bjola, Corneliu, & Zaiotti, 2021). Tidak saja dalam era pandemi covid-19 yang secara radikal mengubah *platform* diplomasi tradisional menuju praktik diplomasi digital, tetapi juga pola dan tata cara termasuk konten diplomasi, turut berubah. Dalam pandemi covid-19, kesetaraan dalam penggunaan teknologi internet juga menunjukkan adanya kesetaraan antara dunia Barat dan kemajuan di Timur.

Pergeseran dan kesetaraan yang diadopsi oleh teknologi merupakan bahasan yang menarik. Hanya saja dalam tulisan kali ini kami tidak membahas pergeseran sentral tersebut. Buku ini menyajikan perihai migrasi diplomasi dari *off-line* menuju diplomasi *on-line*, khususnya diplomasi non state actors dalam kancah diplomasi digital.

## 2. Diplomasi *Platform* Digital

Inilah era baru, *on-line* era, yakni seluruh aktivitas diplomatik dan kerjasama menggantungkan pada teknologi digital dan elektronika. Dalam era baru tersebut, diplomasi dunia mengubah pola komunikasi dan informasi dari pertemuan tatap muka tradisional (*on-site*) menjadi pertemuan daring (*on-line*). Semua proses itu muncul dengan tiba-tiba dan agaknya ditanggapi secara cepat serta terorganisir oleh aktor internasional yang memunyai penguasaan teknologi internet beserta infrastrukturnya. Fakta internasional di era pandemi covid-19 menunjukkan sebuah drama bersama, yaitu keharusan bagi setiap aktor international dalam menggunakan *platform* digital. Secara praktis, revolusi komunikasi digital tersebut sesungguhnya sudah berkembang sejak tahun 1990-an. Namun demikian, pandemi covid-19 tidak membuka pilihan yang lain kecuali menerima *platform* digital sebagai sarana berkomunikasi dan dialog. Era pertemuan dan dialog onsite terdisrupsi, tergantikan oleh *platform* baru, yaitu diplomasi digital. Dalam banyak hal, *platform* baru ini dapat memainkan peran ganda. Di satu pihak, diplomasi digital hadir sebagai sarana untuk meningkatkan pencapaian kepentingan nasional dan perdamaian internasional. Di lain pihak, diplomasi digital juga dapat digunakan untuk tujuan perang dan mengubah tata hubungan internasional yang baru melalui bentuk agresi dan intervensi secara virtual.

Bagaimana diplomasi digital memainkan peran besar dalam menjangkau publik internasional adalah pertanyaan yang akan dicari jawabanya dalam tulisan ini. Dalam hal ini mengenai praktik diplomasi digital yang dilakukan oleh aktor non negara, baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan aktor negara, yakni aktor individual atau sekelompok orang (tim) yang meminta bantuan dari lembaga pemerintah seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, atau bekerja sama

dengan organisasi non negara yang lain seperti NGO dan IGO, atau organisasi swasta lainnya. Perlu dicatat bahwa diaspora juga memainkan peran penting dalam mempraktikkan diplomasi budaya dan hubungan sosial maupun dalam hubungan perdagangan. Dengan kerjasama tersebut, seluruh aktor memunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk memainkan peran diplomasi digital. Pada observasi awal, berbagai pernyataan di internet memperlihatkan bagaimana diplomasi digital mampu meningkatkan popularitas (citra diri) bangsa maupun untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama lebih agresif, baik di bidang seni, budaya, olah raga dan kolaborasi internasional lainnya. Dalam beberapa hal, jembatan digital tersebut digunakan untuk penetrasi terhadap negara target sasaran guna meningkatkan kemampuan kontribusi dalam meminimalisir krisis internasional secara real time. Dengan demikian sangat jelas bahwa diplomasi merupakan fakta internasional yang menonjol dan tak terbantahkan.

Sekali lagi kami menyampaikan bahwa riset ini tidak sedang menyoroti diplomasi digital yang dimainkan oleh *state actors* diplomasi, namun fokus pembahasan berkisar peran dan aktivitas yang dimainkan oleh *non state actors*. Itupun terbatas pada peran dan aktivitas aktor diplomasi yang paling terkecil dari *non state actors*, yaitu individu. Jadi, kami tidak membahas tentang peran dan aktivitas aktor negara yang besar, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan International Non governmental Organization (IGO) serta perusahaan multinasional (MNC). Individu sebagai aktor terkecil dalam diplomasi digital itulah yang kami sebut sebagai Nano *Power Diplomacy*.

### 3. Perumusan Masalah

Uraian di atas pada dasarnya mengungkapkan perihal bagaimana aktor internasional, baik *state actors* maupun *non state actors* telah merespon perubahan radikal pada pola komunikasi internasional dan tata kelola terhadap perkembangan teknologi dan efek pandemi covid-19. Dalam penelitian berjudul Nano *Power Diplomasi: Migrasi diplomasi off-line ke Diplomasi On-line* ini membahas perihal bagaimana diplomasi digital memainkan peran besar dalam menjangkau publik internasional. Rumusan masalah dibagi dalam tiga hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran hubungan internasional memengaruhi peran dan kerjasama antara state actors dan non-state actors dalam diplomasi?
2. Bagaimana basis konseptualisasi Nano *Power Diplomacy* digali sebagai pijakan teoritis?
3. Bagaimana aktivitas migrasi diplomasi yang dilakukan oleh aktor individu dari off-line ke diplomasi on-line? (Untuk pertanyaan ketiga akan diteliti pada tahun kedua).

## **B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Riset ini diarahkan untuk menjadi buku ajar (tahun pertama) dan menjadi buku referensi pada tahun kedua. Riset yang didanai oleh Dikti (2021-2022) melalui skim Penelitian Dasar ini juga ditujukan untuk memberi kontribusi terhadap aktor internasional dalam hal praktik diplomasi digital, khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia serta warga Indonesia. Manfaat utama riset ini adalah memberikan kontribusi teoritik dalam dunia akademik, khususnya bidang studi hubungan internasional. Caranya adalah dengan menjabarkan tentang aktor individu dalam diplomasi dan hubungan internasional. Selama ini, peran individu sebagai non state actors belum banyak dibahas apalagi praktik diplomasi individu dalam diplomasi digital. Riset ini juga bermanfaat bagi *netizen* Indonesia terutama mendorong kepekaan dan kepedulian *netizen* terhadap nusa dan bangsa, dengan cara memromosikan potensi dan kebaikan bangsa kepada dunia internasional. Dengan kata lain, riset ini menginspirasi *netizen* dalam memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi perihal ke-Indonesiaan kepada publik asing, khususnya di era new normal ini. Dengan demikian riset ini bermanfaat sebagai guiding *netizen* dalam memromosikan citra positif bangsa dan negara Indonesia di mata publik internasional.

## C. Metode Penelitian

### 1. Tinjauan Pustaka

Riset ini berbasis diplomasi digital yang secara khusus membahas tentang peran aktor terkecil dari *non state actors*, yang disebut sebagai *Nano Power Diplomacy*. Di era normal baru ini diplomasi menghadapi tiga tantangan utama (Smith, Gordon:& Sutherland, 2002). Pertama berkaitan dengan hadirnya penggunaan teknologi internet yang semakin menonjol, terutama karena terjadinya pandemi covid-19. Meskipun internet bukanlah hal yang baru, pandemi global covid-19 telah mengubah pola komunikasi dan diplomasi dari yang bersifat *off-line* menuju pada penggunaan secara dominan internet dan visibilitas teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*). Keterlibatan teknologi internet mengubah pola diplomasi *on-site* menjadi diplomasi *on-line* atau yang diuraikan di atas adalah diplomasi digital atau diplomasi virtual. Hal tersebut digunakan untuk menyebut hal yang sama tentang aktivitas diplomasi di ranah siber.

Peran aktor individu dalam diplomasi dikategorikan sebagai aktivitas diplomasi lunak (*soft power diplomacy*) (Junior, 2009). Diplomasi digital adalah suatu sarana aktor diplomasi untuk mengomunikasikan gagasan dan cita-cita suatu negara dengan publik asing (Adesina, 2017). Oleh sebab itu, diplomasi digital adalah praktik diplomasi publik yang menggunakan teknologi internet dan media sosial, seperti *Instagram, Twitter, Facebook* dan *Youtube*. Dengan demikian, berbicara tentang diplomasi digital tidak lain adalah mengaji penggunaan media sosial untuk kegiatan diplomasi, yakni bagaimana aktor negara dan aktor non negara, memanfaatkan teknologi internet untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi digital bukanlah menggantikan diplomasi *on-site* dan segala bentuk tata cara diplomasi tradisional, namun secara berdampingan, keduanya saling melengkapi.

Diplomasi diibaratkan sebagai kamar mesin dalam hubungan internasional (Cohen, 1996). Sehubungan dengan hal itu, media sosial dapat disebut sebagai sarana atau mesin yang menggerakkan aktivitas



diplomasi. Aktor negara mengartikulasikan tujuan negara melalui kebijakan luar negeri dan bekerjasama dengan pemerintah asing baik melalui dialog, perundingan, negosiasi, dan kolaborasi secara damai. Sedangkan aktor non negara juga melakukan aktivitas yang sama dalam konteks yang berbeda. Pernyataan tersebut menunjukkan peran diplomasi sebagai sarana dan cara memperoleh *power* dalam hubungan internasional, baik melalui kerjasama internasional, dukungan negara-negara lain maupun melalui upaya persuasi guna mengamankan kepentingan nasional. Kita semua tahu bahwa penggunaan internet sudah berjalan sejak tahun 1990-an. Tidak saja dilakukan untuk kepentingan diplomasi tetapi juga untuk kepentingan bisnis dan perdagangan internasional oleh pihak swasta. Selain itu kita juga melihat bahwa individu seperti pelajar, mahasiswa, peneliti, dosen, *content creator*, dan para seniman juga memanfaatkan internet untuk berbagai kepentingan. Dengan demikian “*meta-power*” yakni penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi, digunakan untuk pendekatan buku ini, sehingga akan jelas operasional bahasannya, seperti pembahasan tentang (1) kendala dan kemudahan yang digunakan dalam praktik diplomasi oleh aktor. (2), bentuk yang dipilih oleh aktor untuk menyampaikan pesan dan gagasannya. (3) analisis konten yang diproduksi oleh kedua aktor untuk mengetahui makna baru dan pemahaman kolektif (Singh, 2015). Hal itu sangat berbeda dengan pendekatan Thomas Schelling yang fokus pada relasi antaraktor dalam politik luar negeri merupakan konflik. Hubungan internasional adalah persoalan keterhubungan dan *power* memainkan peran sentral pada konektivitas tersebut (Sandre, 2015). Ia menyebut bahwa hubungan internasional ibarat papan catur, yang secara tradisional melihat proses relasi antar bangsa sebagai perjuangan untuk menang atau kalah. Morgenthau (2005) menyebutnya sebagai *the struggle for power*. Inilah yang kemudian dikenal dengan paradigma realis.

Buku ini lebih condong pada paradigma ICT, yang intinya adalah pencapaian *power* tidak dalam kerangka konflik tetapi menggunakan logika konektivitas lunak (persuasif). Maka pencapaian *power* dalam hubungan internasional oleh kedua aktor internasional diperoleh

melalui konektivitas jaringan komunikasi dunia. Artinya, bahwa semakin banyak informasi yang dimiliki dan semakin besar jaringan dan peluang konektivitasnya, maka akan semakin besar pula kedua aktor memobilisasi aktivitas internasionalnya.

## 1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui webinar, *focus group discussion* (FGD) dan wawancara. Untuk hal ini kami melakukan webinar dengan tiga duta besar yang masih aktif sebagai wakil RI dan berkuasa penuh yakni Dubes Dr. M. Hery Saripudin, yang menjadi ambasadur di Kenya; kedua Dubes Salman Al Farisi yang bekerja di KBRI Afrika Selatan dan sekitarnya, serta Dubes Al Busyra Basnur, ambasadur yang bekerja di Addis Ababa, Ethiopia. Sedangkan narasumber lain yakni Duta Besar yang sudah purnatugas, yakni A. Agus Sriyono, yang pernah menjabat di Tahta Suci Vatikan, Konjend Widyarka Ryananta, konsulat jendral yang pernah bekerja di Noumea, New Caledonia. Selain narasumber, juga diwawancarai narasumber *non-state actors*, yakni mereka yang secara pengalaman pernah melakukan kegiatan kesenian di luar negeri. Kedua, data referensi yang diperoleh melalui *e-library* dan hasil selancar yaitu data jurnal dan data lain yang diunggah di dunia maya, khususnya media sosial. Data internet yang banyak tersebut, dipilih dan direduksi berdasarkan kebutuhan data yang terkait yakni berkenaan dengan terjadinya proses perubahan radikal atas tata kelola dan tata kerja diplomasi *off-line* ke tatakerja *on-line* pada ranah *individual actors*. Wujud data internet tersebut berupa rekaman atau pernyataan dari para pejabat dan duta besar dari *state actors* dan *non state actors*, yang memang terlibat dalam diplomasi dan hubungan internasional. Data tersebut ditemukan di media sosial seperti youtube, facebook, tweeter dan official web-site KBRI. Sedangkan *official blog* atau *state website* kami gunakan untuk melihat bagaimana *non state actors* tersebut memanfaatkan media sosial untuk memenuhi tuntutan diplomasi dan politik internasional, guna memenuhi kepentingan nasional yang diharapkan.

## 2. Analisis Data

Untuk analisis data, kajian ini menggunakan cara kerja Henry Kissinger, yang menyebut analisis hubungan dan politik internasional harus bersifat kontekstual. Fakta, fenomena dan peristiwa diplomatik dianalisis berdasarkan konteks politik dan konteks sosialnya. Analisis kontekstual tersebut membahas diplomasi dari aspek interpretasi dan tafsir kegiatan diplomasi dihubungkan dengan peristiwa internasional. Untuk mencapai tafsir yang lebih tepat dan terukur, peneliti membutuhkan bantuan orang lain, yakni narasumber. Analisis kontekstual yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen dan pengelolaan diplomasi digital dalam menghadapi perubahan dan dinamika internasional. Pengelolaan manajemen perubahan menjadi aspek penting dan mendasar dalam hubungan diplomatik mengingat arena internasional membutuhkan rancang-bangun yang berkelanjutan, termasuk membangun citra positif negara bagi masyarakat internasional, baik berupa pengakuan internasional, legitimasi dan dukungan internasional. Dengan kata lain bahwa dinamika hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan tata kelola oleh Kementerian Luar Negeri.

## 3. Operasionalisasi

Dari dasar analisis kontekstual tersebut di atas, maka analisis buku ini meliputi tiga pokok bahasan:

*Pertama*, mengemukakan tentang hubungan internasional di masa sebelum dan di masa pandemi, khususnya migrasi diplomasi *on-site to on-line*, kendala dan kemudahan yang digunakan dalam praktik diplomasi oleh aktor.

*Kedua*, menjelaskan tentang dasar filosofis lahirnya konsep *nano power diplomacy* sebagai bentuk diplomasi baru, yang menjadi bahasan utama oleh penulis buku ini, mendampingi bentuk diplomasi yang lain, yakni *hard power diplomacy*, *soft power diplomacy* dan *smart power diplomacy*.

*Ketiga*, analisis konten media sosial yang dilakukan oleh aktor nano, bertujuan untuk mengetahui makna baru dan pemahaman kolektif (tahun 2022).

## **BAB II**

# **HUBUNGAN INTERNASIONAL DI MASA PANDEMI GLOBAL COVID-19**

Pandemi Global Covid-19 memunculkan pertanyaan yang tidak mudah untuk menentukan jawaban. Hubungan internasional yang mengacu pada pencarian kebenaran obyektif, sekarang ini tidaklah mudah. Hubungan internasional dihadapkan berbagai kebenaran yang bersifat relatif ataupun stipulative, yakni kebenaran yang bergantung dari sudut pandang tertentu. Pertanyaan tentang asal-usul pandemi global covid-19 tidak dapat dijelaskan hanya sebagai pandemi alamiah belaka. Orang kemudian mengambil teori-teori konspirasi yang menyebutkan bahwa pandemi tersebut merupakan bentuk konspirasi aktor global internasional. Ada yang menyebutkan aktor elit global yang tak terlihat (Anonimus), bahkan ada yang terus terang menyebut sebagai elit ilmuminati. Dalam diskursus politik yang berkembang, beberapa sumber menyebutkan bahwa semua itu adalah ulah sekelompok korban holocaust yang membalas dendam kepada Nazi Jerman. Oleh sebab itulah, sekarang kita mengenal virus corona sebagai senjata biologis. Di bagian lain, kelompok kapital atau elit ekonomi yang berada di dalam sel organisasi seperti WHO dan *non-state actors* lainnya ditengarai punya agenda lain. Menurut informasi yang berkembang, pandemi global corona virus adalah peluang untuk mendulang dolar atau memperoleh keuntungan yang fantastis jumlahnya dari penjualan vaksin anti-virus.

Wacana terakhir tentang pandemi global corona virus adalah sedang terjadinya Perang Dunia Ketiga antara Amerika Serikat dan sekutunya dalam melawan China dan sekutunya. Ini berarti bahwa dugaan adanya Perang Dunia Ketiga terkait dengan perang dagang

antara AS-China, yang mana keduanya diduga kuat menggunakan virus sebagai cara untuk menghambat proses perebutan pasar dan kekuatan politik global. Dunia semakin percaya, seperti suara dari Inggris, Prancis dan Jerman, bahwa pandemi global akan melahirkan resesi dunia, sebagaimana terjadi pada Perang Dunia Kedua. Walaupun mereka sadar bahwa sekarang ini bukanlah perang yang dilatar belakangi oleh ideologi, atau isme-isme, namun perang dengan tidak didasari tujuan yang jelas (nihilism) justru bisa menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Virus semakin kuat membangun ketakutan masyarakat, disebabkan oleh penyebaran yang tak terbatas oleh media massa dan media sosial. Kedua saluran informasi tersebut sangat cepat menyebar sekaligus sangat efektif membangun rasa takut masyarakat. Perang virus adalah perang yang tak kelihatan dan bukan perang yang dapat mengidentifikasi musuh dan teman. Virus menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, para ahli sepakat bahwa pandemi global yang terjadi sebelumnya merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantah. Pada saat wabah pes yang merajalela di Eropa abad ke 14 dan juga flu di Spanyol sesudah perang dunia pertama, seluruhnya menunjukkan bahwa pandemi global merupakan gejala alam yang terus tumbuh pada waktu tertentu. Apabila kita yakin bahwa virus adalah fenomena alam, maka jawaban atas lahirnya pandemi global tersebut memang disebabkan oleh faktor alam dan bukan rencana jahat Sang Anonimus.

## **A. Diplomasi dalam *New Normal***

*New Normal* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hidup bersama covid-19. Hubungan internasional juga memasuki era new normal sejak covid-19 diumumkan pada awal tahun 2020. Seluruh sektor hidup masyarakat, termasuk perubahan pada bidang diplomasi menyesuaikan dengan kondisi. Agaknya, diplomasi sebagai urat nadi dalam hubungan internasional dengan cepat dan radikal mengubah pola hubungan dan komunikasi internasional. Dalam era normal baru inilah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi primadona. Semua aktor internasional wajib menyikapi dengan cara bijak melalui manajemen perubahan yang membutuhkan kreasi, inovasi, dan adaptasi.

Kini dunia global kita telah berubah. Hubungan internasional mau tidak mau harus bermigrasi dari *platform onsite (off-line)* ke *platform on-line* (virtual). Dengan kata lain, pola dan tata kerja diplomasi tradisional bersamaan dan berdampingan dengan pola dan tata kerja diplomasi baru. Diplomasi baru merupakan diplomasi digital berbasis internet dan jaringan teknologi komunikasi meski dalam praktiknya selama kurang lebih satu tahun ini (2020-2021), kedua pola dan tata kerja diplomasi tersebut masih berjalan secara beriringan. Berbicara tentang diplomasi baru, biasanya kita berbicara tentang peran aktor negara dan peran aktor non negara dalam hubungan internasional. Hal itu berkenaan dengan cara kedua aktor internasional dalam menjalankan diplomasi pada era new normal. Dalam buku ini, bagaimana peran aktor non negara, khususnya peran individu bermigrasi dari aktivitas *off-line* ke aktivitas *on-line*, merupakan problematik yang diajukan. Dengan kata lain, perubahan pola komunikasi dan tata kerja *non-state actors* yakni peran warga negara dalam ikut keterlibatan dalam diplomasi, yang sering disebut sebagai *citizen diplomacy*, adalah unsur terkecil (nano) dari kegiatan warga negara dalam usaha mempromosikan Indonesia melalui berbagai aktivitas secara *on-line*, khususnya di media sosial. Hubungan antar warga negara dalam konteks diplomasi disebut oleh Kerr (2018) sebagai diplomasi inter sosial. Maka sering orang rancu untuk membedakan antara di satu pihak relasi antar aktor negara dan kedua relasi aktor inter-sosial di pihak lain. Bahkan peran yang dimainkan keduanya justru menciptakan peran dan fungsi baru dalam diplomasi baru, bahkan apabila keduanya bekerjasama dan tidak berkompetisi, maka akan dihasilkan prospek baru tata kelola diplomatik dan pencapaian kepetingan nasional (Kerr, Pauline; & Wisemen, 2018). Dalam diplomasi baru, peran teknologi internet menjadi determinan ketika prosedur kesehatan mengharuskan aktor diplomasi untuk menjaga jarak dan menghindari kontak fisik secara langsung. Pola penularan covid-19 telah mengubah tata cara dan tata kelola politik internasional dari *platform on-site* (luring) ke menjadi *platform relasi on-line* (daring). Ketika komunikasi dan informasi merupakan arus utama dalam proses diplomatik, maka hal-hal yang sebelumnya bersifat rahasia dan tertutup, dalam diplomasi baru, informasi diplomatik lebih dituntut

untuk bersifat transparan dan akuntabel. Untuk kepentingan itulah, setiap aktor negara dengan Kementerian luar negeri (MFA) dan kedutaan besarnya di seluruh dunia, membutuhkan tata kelola dan tata kerja baru, yakni bermigrasi dari relasi *off-line* menjadi relasi *on-line*. Keuntungan penggunaan *platform on-line* dengan internet tersebut mampu melipatgandakan kecepatan, memperluas jumlah cakupan, memperbanyak jumlah dukungan dan dialog internasional. Dari hasil data wawancara dengan para pelaku diplomasi, penyebaran informasi menjangkau publik yang lebih luas dan rancang bangun konten diplomasi dapat diunggah secara lebih akurat. Bagaimanapun juga, ketergantungan aktor internet telah diakui sebagai sarana yang *low cost* serta mendorong tingkat perubahan internasional secara radikal, baik dari aspek penyebaran gagasan, aspek strategis, pengambilan keputusan dan pemanfaatan peluang yang disediakan internet untuk mengefektifkan pencapaian tujuan nasional (Ashton, Jenifer; & Toland, 2021).

## **B. Meningkatnya Peran Media Sosial**

Sudah dua tahun lamanya virus korona melanda dunia. Hampir seluruh bangsa di dunia terdampak pandemi dan sampai pada tahap yang mengerikan. Kini peradaban dunia benar-benar diuji secara kritis terhadap dampak pandemi virus corona. Di sisi lain, tragedi tersebut telah membangkitkan kebersamaan dalam membangun keselamatan dan keamanan bersama, termasuk dunia diplomasi. Secara tiba-tiba pertemuan, konferensi, perundingan internasional, baik bilateral maupun multilateral telah mengubah tata cara dan tata kelola relasi mereka melalui relasi virtual. Inilah era baru, *on-line era*, yakni seluruh aktivitas diplomatik dan kerjasama menggantungkan pada teknologi digital dan elektronika. Dalam era baru tersebut, diplomasi dunia mengubah pola komunikasi dan informasi dari pertemuan tatap muka tradisional (*on-site*) menjadi pertemuan daring (*on-line*). Semua proses ini muncul dengan tiba-tiba dan agaknya ditanggapi secara cepat dan terorganisir oleh aktor internasional yang memunyai penguasaan teknologi internet dan infrastrukturnya. Fakta internasional di era pandemi covid-19 akhirnya mengharuskan setiap aktor menggunakan

*platform* digital. Secara praktis, revolusi komunikasi digital tersebut dapat memainkan peran ganda. Di satu pihak, diplomasi digital hadir sebagai sarana untuk meningkatkan pencapaian kepentingan nasional dan perdamaian internasional. Di lain pihak, diplomasi digital juga dapat digunakan untuk tujuan perang dan mengubah order internasional yang baru melalui bentuk agresi dan intervensi secara virtual. Aplikasi digital yang sangat populer di masyarakat adalah media sosial, yang telah terbukti menentukan kecepatan dan ketepatan informasi yang dapat mengukur seberapa besar keuntungan kepentingan nasional dapat dicapai. Di masa pandemi, media sosial telah banyak mengambil alih posisi media massa arus utama dalam arti menjadi populer di kalangan politisi dan publik, baik dalam kapasitasnya untuk berkomunikasi publik maupun hanya untuk menyatakan pendapat pribadi atau mewakili institusi. Dalam hal tersebut, revolusi teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang semakin signifikan perannya dalam hubungan internasional, maka tidak salah jika media sosial perlu mendapatkan perhatian dari setiap aktor internasional. Bahkan secara khusus media sosial ini membutuhkan manajemen dan kesiapan sumber daya manusia yang matang. Antara lain juga berkenaan dengan kesiapan pada ketersediaan perangkat keras juga kesiapan untuk perangkat lunak. Diplomat sebagai pengendali dan pemeran diplomasi, dibutuhkan kompetensi ICT yang memadai karena hal ini sangat menentukan keuntungan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan militer.

### **C. Resume dan Evaluasi**

Setelah membaca materi di atas, jelaskan kembali mengapa pandemi global covid 19 muncul. Apakah penilaian Anda terhadap fenomena tersebut sebagai pandemi yang bersifat alamiah, ataukah pandemi sebagai perang dunia ke tiga, ataukah ada konspirasi dari aktor dan elit global yang mencoba mencari keuntungan atas pandemi, seperti penjualan vaksin dan mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dunia dan persaingan ekonomi.



## **D. Pertanyaan Latihan**

1. Mengapa 10 tahun lalu ada film yang menyerupai kejadian pandemi covid-19? Beralasankah orang curiga bahwa pandemi global adalah sebuah rekayasa dan konflik politik internasional?
2. Siapakah yang paling diuntungkan dengan adanya pandemi global covid-19 ini?
3. Bagaimana Indonesia merespon dan menangani pandemi global ini, baik melalui kebijakan maupun aturan yang digunakan untuk mengatasi pandemi?
4. Siapakah pihak yang paling dirugikan secara lokal, regional dan internasional?
5. Apakah pandemi covid 19 tersebut memberikan pelajaran dan peringatan bagi manusia? Jelaskan dengan perspektif religius, aspek sosial dan budaya.

## **BAB III**

# **KONSEPTUALISASI *NANO POWER* *DIPLOMACY***

Dasawarsa terakhir diskursus studi hubungan internasional sebagaimana ditunjukkan dalam *the great debat*, memunculkan berbagai pandangan, pendapat, dan bahkan sinisme para ahli dan teoritikus studi hubungan internasional hampir di semua level. Baik dari para pengikut paradigma idealis, liberalis, behavioraslis, paradigma realis, maupun para pengikut konstruktivis dan post-modernis, pada intinya mereka sepakat bahwa studi hubungan internasional harus memfokuskan diri pada solusi persoalan konflik menuju perdamaian. Artinya, mereka memandang bahwa studi hubungan internasional bukan diamati dalam konteks ketegangan, konflik, dan perang, akan tetapi harus diamati secara kritis untuk menemukan solusi dan pemecahan pada setiap persoalan yang ada.

### **A. Jalur Diplomatik, Dasar Filosofis-ideologis dan Diplomasi Indonesia**

#### **1. Posisi *Nano Power Diplomacy* dalam Sembilan Jalur Diplomasi**

Setiap paradigma tetap dapat mengembangkan isme-isme yang mereka yakini, namun pada akhirnya mereka harus kembali pada persoalan kedamaian, keadilan dan resolusi konflik internasional. Para akademisi memertahankan keyakinan paradigma masing-masing, sehingga mereka selalu membawa pada posisi yang paling benar atau setidaknya mencari menangnya sendiri. Hal itu dapat dicontohkan melalui menguatnya kembali formulasi kaum neo-realis, bahwa hubungan internasional adalah *struggle for power*. Di bawah ini akan

kami tunjukkan fokus persoalan pada tiga paradigmatik hubungan internasional yang paling berpengaruh.

Paradigma	Focus of Interest
REALISME	Power
	Security
	Balance of power
	Detterence
LIBERALISME	Prosperity
	Justice
	Interdependence
	Democracy
INTERNATIONAL COMMUNITY	Participation and solidarity
	International etics
	Law enforcement
	Peace making

Menurut beberapa akademisi hubungan internasional, diplomasi dianggap sebagai bidang studi yang belum mapan bahkan kajian yang terabaikan dalam sejarah keilmuan hubungan internasional (Carlsnaes, Walter; Risse, Thomas; Simmons, 2013). Hal itu menyebabkan adanya marginalisasi dalam studi diplomasi. Oleh karena itu kebutuhan referensi untuk kajian diplomasi akhirnya juga cukup terbatas, bahkan seperti terpisah dari perkembangan teori politik, yang mereka sebut sebagai “*redundant and anecdotal.*” Dampak terhadap studi diplomasi sangat jelas, yakni adanya kesenjangan antara studi tentang teori hubungan internasional dengan studi praktek diplomasi. Hal ini diperparah oleh kegairahan para peneliti untuk mengaji fakta empirik dibandingkan dengan pengembangan teoritik. Kondisi tersebut oleh Christer Jönsson dan Martin Hall (2005) disebut seperti kondisi manusia yang kehilangan jantung, karena mereka yakin bahwa diplomasi adalah jantung hubungan internasional .Pada akhirnya kita memang harus memilih dan mengambil manfaat atas *the great debate*, dan menjadikan teori diplomatik dapat menerapkan pendekatan multiparadigma agar mampu mengimplementasikan teori diplomasi modern, yakni perhatian pada aktor non negara yang baru lahir dalam lingkungan diplomati modern. Dalam bidang studi diplomatik

tradisionalis kita melihat bahwa mereka tidak menyadari bahwa ada aktor diplomatik di luar negara yang menggunakan cara-cara baru dan teknik diplomatik yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Saat ini, sikap individualistis, parokial dan pelit dari kaum tradisionalis dalam memandang kelahiran aktor baru non-negara yang secara intensif mengambil koneksi dan cakupan wilayah yang mungkin bias berbeda. Jika dalam diplomasi tradisional yakni G to G, maka aktor baru non negara tersebut lebih menekankan pada aktor non konvensional, seperti LSM (lembaga swadaya Masyarakat, IGO, NGO bahkan aktor individual. Dalam konteks terkini, diplomasi multi jalur adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam studi hubungan internasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Institute for Multi-Track Diplomacy (Burgess, Heidi; Burgess, 2016):

*Multi-track diplomacy is an extension of the notion of track two diplomacy, or citizens' diplomacy, that was first introduced by a foreign service officer Joe Montville in 1981. He made the distinction between Track One, which he defined as official governmental action, and Track Two was anybody who was involved in peacebuilding activities, but was unofficial, not part of the government.*

Oleh sebab itu, secara praktis perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka untuk saling bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. McDonald (1996) lebih jelas mengatakan bahwa diplomasi merupakan sarana untuk mencapai perdamaian dan resolusi konflik internasional, yang dapat dilakukan antara *state actors* dan *non state actors*. Dalam memandang kegiatan dua aktor yang berbeda baik secara paradigma maupun penggunaan teori, tidak dapat dipisahkan apalagi hanya melihat diplomasi melalui kacamata tunggal atau cara pandang satu lensa. Menurut hemat kami, sikap yang demikian itu akan semakin menyembunyikan fakta internasional yang obyektif. Maka dalam hal ini, sebagai akademisi yang terbuka, kita harus mengadopsi pendekatan yang bersifat eklektif, yakni menggunakan berbagai perspektif baik teori maupun paradigma, atau setidaknya tiga kelompok mazhab yang disebut di atas, yaitu teori realis, teori liberalis dan teori komunitas internasional. Cara eklektif tersebut akan mudah memromosikan pengetahuan dan teori diplomasi yang baru lahir, berdampingan dengan pengetahuan yang mapan dari diplomasi

tradisional. Tujuan dari adopsi teori eklektif adalah mengubah sikap apriori menjadi sikap yang saling menghormati terhadap semua teori dan secara sukarela melihat hubungan internasional dengan kaca mata multiperspektif. Dengan kata lain, teori diplomasi eklektik mengakui dan memajukan pengetahuan baik aktor diplomatik negara maupun non-negara dan bentuk diplomasinya masing-masing. Tidak ada satu teori yang dianggap lebih baik dari yang lain. Semua memiliki bobot yang sama; semua memiliki kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pemahaman kita tentang lingkungan diplomatik abad ke-21. Berteori secara eklektik adalah suatu tindakan yang maju dan relevan dengan perkembangan hubungan internasional mutakhir. Sebaliknya, lembaga negara sebagai aktor tetap boleh jadi menjadi pusat perhatian, tetapi munculnya peranan aktor non negara, sistem hubungan internasional modern penting untuk dilibatkan sebagai cara kita untuk mengkonsolidasikan dan mengiteraksikan berbagai teori diplomatik. Sejak tahun 1990, James N. Rosenau dalam karyanya *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*, melihat dan menyelidiki hubungan internasional pascaperang dunia kedua. Ia menyimpulkan bahwa dunia global adalah wilayah yang terus bergejolak, khususnya dari dampak revolusi mikroelektronika, tatanan pascaindustri, dan perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Justru itulah, ia tidak meneliti tentang bagaimana negara harus menempatkan diri dalam situasi turbolensi tersebut, ia justru mengembangkan formulasi baru, yakni menggali lebih jauh ke dalam cara kerja komunitas dan orientasi individu yang berujung pada aksi kolektif di panggung dunia. Rosenau yang banyak membongkar pemikiran tradisional, menunjukkan terjadinya pelemahan pada struktur otoritas lama dan terpecahnya kolektivitas aktor. Di tengah perubahan itu, ia melihat bahwa pada tingkat mikro, subkelompok menjadi lebih kuat. Dalam hal ini loyalitas terhadap peran negara disampingkan sehingga loyalitas kelompok mikro ini dari pemerintah beralih pada peran yang mandiri. Transformasi dan dinamika yang bergejolak pada era millennium ini telah mendorong kecenderungan bergantinya sentralisasi *power* dan kecenderungan terjadinya disentralisasi pada struktur aktor internasional. Situasi yang bergejolak tersebut cukup untuk memberi argumentasi bahwa eklektisis dibutuhkan.

Setidaknya pandangan itu dapat mensubversi para ahli teori diplomatik untuk memersoalkan efektivitas lembaga diplomatik tradisional serta mengajukan akvitas aktor non-negara, sebagai aktor yang menjalankan diplomasi secara lebih relevan. Duta besar RI di Ethiopia, Al Busra Basnur mengatakan bahwa aktivitas diplomasi 70 persen dijalankan oleh aktor non-negara, dan 30 persen sisanya dijalankan oleh aktor negara. Pernyataan tersebut jelas, bahwa peranan aktor non negara dalam diplomasi modern sangat signifikan. Duta besar RI, Busro Al Basnur dalam wawancara secara daring menunjukkan bahwa aktor negara tidak dapat melaksanakan diplomasi total secara optimal apabila tidak didukung oleh peran yang relevan oleh aktor non negara. Meskipun dalam banyak hal, institusi diplomatik tradisional memertahankan monopoli kebijakan luar negeri namun aktor non negara memiliki kepentingan perifer atau sekunder. Penjelasan di atas menunjukkan kenyataan bahwa studi diplomasi sebagai praktek dalam hubungan internasional kurang memperoleh pengakuan di satu pihak dan di lain pihak upaya-upaya para ahli dalam membangun dan mengaji teori diplomasi kurang bersemangat. Bahkan beberapa ahli pesimistis terhadap studi diplomasi sebagai teori. Mereka secara sinis menganggap diplomasi sebagai seni praktek berunding, kurang memenuhi standar ilmiah. Hal ini sejalan dengan kesenjangan tersebut di muka, yakni kurangnya dukungan literatur atau referensi bidang diplomasi yang memadai hingga menyebabkan studi dan teoritisasi diplomasi menjadi lemah. Namun, bagi para ahli hubungan internasional yang berpikir positif dan optimistis, jelas fakta sejarah dua perang dunia yang lalu, menunjukkan bahwa diplomasi memainkan peranan yang penting. Diplomasi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang tangguh menghadapi tantangan kedaulatan rakyat dan nasionalisme diabad ke 19 meskipun studi diplomasi masih memfokuskan diri pada peranan aktor negara (Carlsnaes, Walter; Risse, Thomas; Simmons, 2013). Kendala yang besar untuk menggali teori diplomasi disebabkan diplomasi secara tradisional masih bersifat rahasia dan berulang-ulang melakukan pekerjaan yang sama dan itu-itu saja (Christer Jönsson, & Hall, 2005). Baru mulai tahun 1990-an ditandai dengan berdirinya lembaga studi diplomasi, terbitnya jurnal dan serial publikasi tentang diplomasi,

sebagaimana dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Institut Studi Diplomasi di Georgetown University, Pusat Studi Diplomasi di Universitas Leicester, Asosiasi Studi Internasional (ISA), Asosiasi Studi Internasional (BISA) di Inggris. Lahirnya paradigma post-modernisme juga dianggap telah mendorong terjadinya debat teoritis tentang diplomasi (Carlsnaes, Walter; Risse, Thomas; Simmons, 2013). Carlsnaes dkk menyebut bahwa “perang sebagai lawan diplomasi” adalah pandangan klasik. Dari pernyataan tersebut, kita melihat bahwa hubungan internasional hanya ada dua perspektif, yaitu kalau tidak damai adalah perang. Pandangan ini melandasi paradigma realis bahwa hubungan internasional adalah arena perebutan *power*. Tetapi sesungguhnya dalam tradisi studi hubungan internasional di luar Barat akan banyak ditemukan sebuah tata hubungan yang bersifat lunak dan tidak koersif (Cohen, 1996). Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa “diplomasi koersif” digunakan oleh peneliti Barat untuk menjelaskan hubungan antar negara. Para ahli yakin bahwa aktor negara selalu menggunakan *power* untuk mencapai kepentingan nasional. Para ahli Barat juga memercangkakan *power* dalam upaya menjelaskan ancaman dan cara paksa kepada pihak lain agar tidak melakukan intervensi atau mengubah *status quo* yang ada. Maka tidak berlebihan jika buku ini menawarkan sebuah pandangan alternatif yang mungkin berada di luar diskursus yang sekarang berkembang. Tempo hari saya menyebutnya sebagai paradigma *out of the mainstream*. Buku ini menunjukkan bahwa unsur aktor dalam hubungan internasional tidaklah tunggal, sebagaimana diungkapkan oleh paradigma realis.

Paradigma realis melihat hubungan internasional sebagai hubungan antar negara yang bersifat resmi. Kaum realis tidak menganggap penting peran aktor non-negara. Pada kenyataannya, hubungan internasional berisi pula hubungan antar kelompok swasta dan hubungan antar warga negara. Kelompok swasta dan kelompok orang per orang, pada kenyataannya juga memainkan peranan kontributif bagi perdamaian dunia, berkontribusi terhadap pencapaian ekonomi dan politik, kontribusi tanpa harus perang dan memikul senjata. Louise Diamond dan John McDonald (1996) berhasil

menunjukkan kepada dunia bahwa peran aktor non negara mempunyai kontribusi yang besar. Dalam pendekatan sistem internasional untuk perdamaian adalah pemikiran baru yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan oleh orang lain. Keduanya menyebut sebagai konsep "diplomasi multi-jalur" (*multitrack diplomacy*). Di sini keduanya menggambarkan cara kerja hubungan internasional melalui sembilan jalur berbeda untuk tujuan yang sama. Dalam hal peran aktor negara dan non negara memiliki jalur masing-masing, yang dalam berbagai kesempatan mampu saling bekerja bersama untuk menciptakan sinergi bagi pengembangan perdamaian. Dengan demikian, pencapaian kepentingan dan tujuan nasional biasanya didominasi oleh negara, sekarang sudah jelas bahwa kepentingan nasional dapat dicapai melalui berbagai jalur dan berjalan secara sinergis.

Dalam bukunya, *Multi-Track Diplomacy- A Systems Approach to Peace* (1996) Diamond dan MacDonald, berbicara tentang sistem internasional dengan cara kurang lebih sama, seperti yang dilakukan oleh para ahli teori sistem lainnya, bahwa diplomasi multi jalur tersebut memang mempunyai sistem pengorganisasian yang longgar. Mereka bergerak di lingkungan masing-masing secara mandiri. Setiap jalur memiliki sumber daya masing-masing yang berbeda-beda satu jalur dengan jalur lainnya. Sangat mungkin juga jalur-jalur diplomasi tersebut juga mempunyai tujuan yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Namun pada akhirnya seluruh jalur tersebut mampu berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, dalam jalur bisnis biasanya misi mereka kurang memerhatikan tujuan perdamaian. Hal ini disebabkan karena tujuan bisnis adalah profit dan untuk menghasilkan uang. Seperti juga terjadi pada jalur lembaga swadaya masyarakat yang didukung oleh para aktivis, biasanya juga tidak mengkhususkan untuk tujuan perdamaian namun mereka lebih mengutamakan tujuan mereka untuk membela dan memenangkan pihak-pihak yang diperjuangkan. Sembilan jalur yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 1.** Sembilan jalur diplomasi. Sumber Louise Diamond dan John McDonald (1996).

Dalam konteks diplomasi banyak jalur (*multitrack diplomacy*) tersebut di atas, posisi *Nano Power Diplomacy* terletak pada jalur ke 4 (empat) yakni jalur *privat citizen*. Uraian di atas juga menunjukkan bahwa setiap jalur memunyai tujuan dan sumber dana yang berbeda-beda, termasuk pendekatan dan teori yang mereka gunakan karena memang setiap aktor individu memunyai latar belakang budaya dan dasar filosofis dan ideologis yang berbeda-beda. Dari hasil penggalian data diperoleh hasil antara lain, *pertama*, terjadinya pergeseran paradigma hubungan internasional telah melahirkan diplomasi baru, yakni sembilan jalur diplomasi (*multitrack diplomacy*) dan determinan teknologi internet dalam era pandemi covid-19. Era ini mengharuskan aktor diplomasi menjaga jarak dan menghindari kontak secara langsung. Artinya, pandemi covid-19 dan fasilitasi teknologi telah mengubah tata cara dan tata kelola politik internasional dan diplomasi dari *platform on-site* (luring) menjadi *platform relasi on-line* (daring). Dalam relasi daring, riset ini telah menunjukkan proses diplomatik dan hubungan internasional menjadi lebih terbuka dan *direct*, yang mana

ketika diplomasi dilakukan secara luring, hal-hal yang bersifat rahasia dan tertutup telah menunjukkan perubahan radikal, yakni adanya tuntutan atmosfer diplomasi yang lebih transparan dan akuntabel. Akhirnya kita melihat bahwa perdamaian tersebut mereka definisikan sesuai dengan latar belakang budaya setiap jalur. Mereka lebih terbuka untuk mendefinisikan perdamaian, atau mereka menyebutnya perdamaian sebagai cara membuat dunia menjadi tempat hidup yang nyaman dan lebih baik. Dengan begitu, pendekatan mereka pada setiap jalur juga berbeda-beda. Tujuan dan kepentingan mereka juga dipengaruhi oleh darimana sumber biaya dan sumber daya itu datang. Maka dari itu, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, sinergitas antara aktor negara dan aktor non negara tetap dibutuhkan. Ketika semua jalur tersebut bersinergi, bekerja secara bersama-sama, maka jembatan untuk mencapai perdamaian dapat diwujudkan. Pada kenyataannya, seperti ahli teori sistem lainnya, menyadari adanya kelonggaran dan masing-masing elemen berdiri secara mandiri, meskipun mereka bekerja secara sinergis, namun siapa yang bertanggung jawab atas persoalan yang dihadapi, siapa yang mengatur dan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, juga cukup pelik. Mereka bekerja secara sinergis antar jalur dilandasi oleh kesepahaman, gagasan, peran, persepsi yang kurang lebih sama dengan cara-cara yang kurang lebih sama untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Kita dapat menutup mata bahwa secara faktual setiap jalur menjalankan misi masing-masing. Oleh karenanya mereka membuat keputusan sendiri, untuk alasan mereka sendiri, dan untuk tujuan mereka sendiri. Hanya saja ketika mereka semua berinteraksi dan berkomunikasi, mereka berusaha melakukannya secara kompak meskipun hal itu tidak lepas dari sistem tawar menawar yang ketat (*bargaining position*). Mereka memunyai persepsi dan tujuan yang sama dalam membangun perdamaian yang lebih besar atau secara bersama-sama meredakan konflik kepentingan yang ada dalam arena internasional.

## 2. Dasar Filosofis dan Ideologis

*Nano Power Diplomacy* sebagai jalur ke empat, *privat citizen*, agaknya lebih dekat dengan alur paradigma konstruktivisme, yakni

paradigma yang berangkat dari latar sosial budaya aktor. Artinya, sumber utama praktik hubungan internasional didasarkan atas kepemilikan latar sosial-budaya bangsa dan pandangan dunia. Dalam perspektif tersebut, *Nano Power Diplomacy* dilandasi oleh dasar ideologis Republik Indonesia (RI) yaitu Pancasila, yang terkandung di dalamnya lima sila. Kelima sila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai sumber filosofisnya, *Nano Power Diplomacy* bersumber pada kearifan Nusantara, yakni *Mamayu hayuning bawana*. Dasar filosofis tersebut pada prinsipnya adalah semangat kebersamaan dan semangat kerukunan untuk mencapai dunia yang penuh kedamaian dan ketentraman. Dalam hal ini, setiap pelaku diplomasi harus berpegang pada prinsip persaudaraan, mengikuti kaidah moral, serta mengikuti norma dan nilai universal. Hal itu berarti hubungan internasional adalah sebuah medan dialog dan kerjasama antar warga dan bukan sebagai wadah kompetisi. Hubungan internasional adalah wahana hidup berbagi, hidup bertegur sapa sebagaimana kehidupan sosial di masyarakat desa. Hanya saja, hubungan internasional adalah desa global yang anggotanya terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan latar sosial budaya yang berbeda-beda. Falsafah *Mamayu hayuning bawana* secara umum dapat dijabarkan sebagai upaya “mengindahkan dunia” melalui penghormatan terhadap perbedaan dan bersedia berbagi nilai dan pengalaman (*share of values* dan *share of experiences*), menjamin terbukanya hidup berdampingan secara damai (*peace-full coexistence*) (Purwasito, 2013). Dalam falsafah *mamayu hayuning bawana* setidaknya ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yakni kemauan (1) menjaga survivalitas peradaban secara bersama dengan memelihara persaudaraan global; (2) Membangun kebersamaan dan sistem kekeluargaan global berdasar atas kemandirian atau *self-sufficiency*; (3) Menjalani kekeluargaan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mencapai kehidupan berbagi yang harmonis dan saling menguntungkan tersebut, aktor nano harus bekerja secara sinergis dan kompak. Sebagaimana dijelaskan pada paragraf terdahulu bahwa praktik diplomasi dalam hubungan internasional tidak lain

adalah upaya melaksanakan tercapainya perdamaian dunia dengan landasan sinergitas antar aktor. Maka dalam praktik diplomasi nano, selain dilakukan secara mandiri, tetapi juga membutuhkan sinergitas, kolaborasi dan kerjasama yang saling percaya. Karena tujuan diplomasi nano adalah upaya meningkatkan kualitas persaudaraan global, maka dari itu, konektivitas dan sinergitas antar aktor tersebut dalam praktiknya adalah mempererat tali persaudaraan global berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Diplomasi nano adalah menjalin jaringan dan solidaritas global bagi perdamaian dunia yang adil dan sejahtera. Itulah kandungan falsafah hidup *Mamayu hayuning bawana*, mengindahkan dunia. Uraian tersebut di atas mendudukan posisi diplomasi nano dalam *multitrack diplomacy*, jalur ke empat, *privat/ citizen diplomacy*. Peran dan aktivitas individu dalam kancan hubungan internasional adalah *nano relations* yang kami rangkum dalam istilah *Nano Power Diplomacy*. Itulah aktor non negara yang paling terkecil yang kami sebut juga sebagai *netizen diplomacy*.

### 3. Sejarah Singkat Diplomasi Indonesia

Diplomasi RI terkini direpresentasikan dalam dua judul artikel tabloid Kementerian Luar Negeri Indonesia Tabloid Kemenlu No 101/X/01-02 2017, diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, yang secara jelas menunjukkan arah diplomasi Indonesia kontemporer. Diplomasi kontemporer Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, bahwa demokrasi adalah hal penting bagi kehidupan bernegara dan hubungan antar Negara. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, juga menyatakan bahwa diplomasi Indonesia terus berjalan di tengah ketidakpastian dunia. Dari dua pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan praktik demokrasi. Hal ini sejalan dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 dan Pancasila, yakni melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Artinya, bahwa politik luar negeri RI adalah implementasi dari praktik demokrasi sebagai *platform* kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan internasional. Pernyataan di atas juga dapat ditangkap sebagai sinyal bahwa masih adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki

demokrasi bukan satu-satunya *platform* dalam berdemokrasi. Kalimat dalam judul tabloid tersebut selain sebuah penegasan dari pemerintah RI juga sebagai peringatan kepada semua pihak agar tidak menjalankan negara di luar *platform* demokrasi. Sampai saat ini sistem pemerintahan dan kenegaraan RI menganggap demokrasi sebagai *platform* politik yang ideal dan terbukti telah dipraktikkan oleh banyak bangsa dan negara, termasuk dalam *platform* pelaksanaan diplomasi dalam hubungan internasional. Pernyataan Menlu Retno Marsudi, lebih khusus mengesankan adanya optimisme dalam melihat diplomasi di masa depan. Meskipun masa depan hubungan internasional memang sulit untuk diprediksi. Masa depan adalah ketidakpastian tetapi Retno Marsudi optimistis bahwa diplomasi Indonesia mampu mengatasi persoalan dan halangan serta mampu memenuhi kepentingan nasional secara optimal. Ketidakpastian masa depan harus disikapi secara kritis seperti halnya perubahan radikal sistem hubungan internasional yang mengarah pada sistem hybrid (perpaduan *onsite* dan *on-line*). Maka dari itu, di dalam ketidakpastian tersebut, dibutuhkan kesungguhan diplomasi RI untuk meredefinisi ulang tentang politik luar negeri RI secara cerdas, terutama menyangkut reaktualisasi politik luar negeri yang bebas aktif dan pelaksanaan diplomasi secara total. Bagaimanapun juga masa depan tetap membutuhkan prediksi dan pilihan-pilihan strategi karena hal itu menjadi arah dan jalur RI untuk bermain di medan laga hubungan internasional. Artinya, masa depan hubungan internasional harus dijelaskan secara rasional, praktis dan perspektif akademik. Pemerintah RI perlu secara terus menerus berdialog dengan dunia akademik agar problematika hubungan internasional dapat dibicarakan secara transparan. Sejak awal berbicara tentang tatanan dunia global dan hubungan antar bangsa, kita melihat bahwa tatanan dan pola hubungan internasional tidak pernah bisa dijamin baik stabilitas maupun kondusifitasnya. Namun hubungan internasional dapat diprediksi dan diramalkan kemungkinan-kemungkinannya. Kontinuitas peradaban dan perjalanan kehidupan masyarakat global menunjukkan tanda-tanda yang tetap seperti kepanikan, keresahan, konflik, teror dan anarkitis. Hal tersebut merupakan cara pandang kelompok realis, yang mempercayai bahwa sejarah itu selalu saja berulang, yakni politik kekuasaan, konflik dan

kemungkinan perang. Egoisme aktor negara dalam hubungan internasional selalu saja berebut kemenangan dalam persaingan. Setiap aktor negara membentuk supremasi global, sehingga menyulut aktor negara lain merasa ketakutan, kecurigaan dan persaingan yang keras (Heywood, 2017). Pada akhirnya yang terjadi pada dunia global adalah kecurigaan, konflik kepentingan dan perang. Berbeda dengan kelompok liberal, mereka melihat bahwa sejarah bergerak ke depan dengan optimisme. Masa depan adalah kemajuan yang lebih baik. Sejarah bergerak dari era kegelapan menuju era terang benderang. Kelompok liberal ini yakin bahwa akal sehat mampu menciptakan kerjasama dan perdamaian. Setiap aktor selalu bersedia bekerjasama melalui hidup berbagi, saling bergantung satu dengan yang lain, dengan mengikuti sistem atau aturan (*order*) internasional yang dipatuhi serta secara bersama-sama maju dengan dasar demokrasi (Heywood, 2017). Sedangkan dari pandangan kaum kritis, hubungan internasional digerakkan oleh kekuatan materi dan kekuatan ekonomi. Sebagaimana disebutkan oleh tradisi post strukturalis, terutama M. Foucault, yang menyatakan bahwa hubungan internasional adanya kelompok negara-negara dominan, yang mendominasi kelompok negara-negara marginal, sehingga melahirkan apa yang disebut oleh Habermas sebagai hegemoni. Dalam pada itu, kelompok kritis dari perspektif konstruktivitis sosial menambahkan pergerakan sejarah tidak saja berbasis ekonomi dan materialism, tetapi kekuatan gagasan, norma dan nilai-nilai juga ikut berkontribusi dalam membangun sejarah dunia (Heywood, 2017). Dari pandangan ketiga paradigma hubungan internasional tersebut, kalimat Retno Marsudi yang berbunyi “diplomasi Indonesia terus berjalan” menyiratkan ada keraguan dalam melangkah. Maka tak mengherankan jika kemudian melahirkan pertanyaan: “apa yang terus berjalan?” . Sudah tentu, praktik diplomasi dan hubungan internasional terus dijalankan apapun tantangan dan peluangnya. Sebenarnya dunia global dan hubungan internasional telah menyediakan berbagai pengalaman dan akademisi menyediakan teori yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Dengan demikian tidak perlu ada keraguan tentang diplomasi dan masa depan. Sesungguhnya diplomasi Indonesia dan politik luar negeri dapat dijelaskan secara prediktif. Karena itu Menteri Luar Negeri

sudah selayaknya optimistis bahwa strategi politik luar negeri depan menghadapi tantangan tetapi juga memunyai peluang besar untuk memenuhi kepentingan nasional. Hal tersebut agaknya membuka pikiran saya bahwa sebenarnya idealisme dan pemahaman diplomasi bebas-aktif yang selama ini kita jadikan pegangan belum sepenuhnya mapan. Mungkin juga diplomasi bebas-aktif itu tidak lagi relevan dengan perkembangan dan dinamika hubungan internasional. Bila hal ini dihubungkan dengan edar pendulum diplomasi kita yang bergoyang ke kanan dan ke kiri tanpa kendali, mengisyaratkan bahwa politik bebas aktif kita menjadi makin liar.

Pernyataan, “diplomasi terus berjalan” hanya sebuah penegasan retorik bahwa politik bebas aktif masih menjadi *platform* politik luar negeri. Jadi, praktik diplomasi Indonesia tidak boleh berada pada ketidakpastian dan keragu ragan. Misalnya dalam ikut ambil bagian dalam politik persekutuan, seperti G20 atau sejenisnya. Oleh karena mengikuti politik persekutuan bukan lagi mengikuti atau mengambil posisi pada poros atau blok kekuatan global, sebagaimana terjadi pasca perang dunia kedua, diplomasi Indonesia tidak boleh dalam keraguan. Katakanlah sekarang ini RI lebih condong untuk bersekutu dengan China untuk membangun Indonesia, untuk ini perlu dilihat neraca perimbangannya. Dalam praktiknya politik luar negeri “bebas-aktif” tampak diterjemahkan secara *arbitrair* (sembarangan). Katakanlah bahwa pendulum bebas itu tidak boleh bergerak liar, namun membutuhkan kontrol dan imbalan yang “aktif” dalam menerjemahkan kerjasama, investasi dan pembangunan.

Sejarah mencatat model atau lebih tepat disebut sebagai slogan diplomasi Indonesia, misalnya seperti dinyatakan oleh Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, bahwa diplomasi Indonesia seperti berlayar di antara dua karang (Hatta, 1946). Pernyataan tersebut lahir oleh karena kondisi sesudah perang dunia dan perang dingin, dunia dan hubungan internasional terbagi dalam dua kutub kekuatan global (*bipolar system*), yakni kutub kapitalis-liberalis yang dipimpin AS dan kutub negaranegara komunis yang dipimpin oleh USSR. Sesudah perang dingin selesai, dunia global dan pola hubungan internasional berubah. Dunia menjadi terpolarisasi sehingga setiap aktor tidak lagi bergantung pada dua kutub kekuatan, yang kemudian dikenal dengan *multipolar system*.

Dengan demikian, Republik Indonesia ikut serta menyesuaikan perkembangan atau konteks dinamika hubungan internasional tersebut. Maka slogan politik luar negeri RI berubah menjadi *sailing among multirocks* (berlayar di antara banyak karang). Dalam era sistem multiporal, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, menitikberatkan diplomasi Indonesia pada relasi dengan aktor internasional secara sederajat. Bahwa diplomasi Indonesia tidak lagi berada diantara dua karang, tetapi ia menyebut *thousand friends, zero enemy*. Diplomasi Indonesia tidak berlayar di antara banyak karang, tetapi dengan banyak kawan lebih baik dari pada ada musuh satu sekalipun. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia di masa itu gencar mencari kawan atau negara *partnership* agar mesin diplomasi berjalan pada jalur yang benar. Diplomasi Indonesia memasuki abad ke 21, pada era Presiden Widodo, lebih menitikberatkan pada diplomasi yang membumi, yang kemudian disebut sebagai *down-earth diplomacy*. Dari uraian di atas jelas bahwa setiap periode rezim mempunyai *platform* politik luar negeri masing-masing. Setiap slogan telah menandai sifat dan karakter serta semangat zaman. Hal itu berarti bahwa diplomasi Indonesia juga mengikuti dinamika dan pola hubungan internasional yang terus berubah. Di sinilah dibutuhkan manajemen perubahan yang mendasar tanpa mengubah dasar filosofis politik luar negeri kita yang berbasis ideologis Pancasila dan basis structural, Undang-undang Dasar 1945. Bung Hatta (1946) mengingatkan kepada kita bahwa slogan tersebut adalah dasar falsafah yang dapat menuntun RI pada jalan yang benar. Slogan dan semboyan bukan sekedar retorika dan berhenti pada ungkapan saja, namun memuat konsekuensi logis, yakni mencapai tujuan nasional yang tinggi. Landasan tersebut membutuhkan penerjemahan secara praktis agar siapapun presidennya, politik luar negeri Indonesia berjalan sesuai jalurnya (*on the track*). Dengan begitu RI mempunyai pendirian tetap agar politik luar negeri tidak dijalankan secara semena-mena. Ibarat berlayar di lautan yang ganas, RI tidak terombang-ambing di antara karang-karang yang ganas dan tidak pula tersudut pada posisi yang terjepit. Tersudut adalah posisi dimana RI telah terhegemoni oleh satu negara atau oleh satu kubu saja.

Kita mempunyai Pancasila, maka seyogyanya RI secara tegas mendeklarasikan semboyan “diplomasi Pancasila” yakni diplomasi



yang basis kekuatannya mendasarkan pada Ketuhanan YME, berazas kekeluargaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi, keadilan dan persatuan Indonesia. Prinsip diplomasi berlandaskan kekeluargaan tersebut sebagai hal sangat nyata, karena pada dasarnya seluruh umat manusia memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta tanpa memandang agama ataupun kekurangan mereka. Henry Makow (2015) menyebut “Kita semua memiliki percikan ketuhanan di dalam diri kita. Saya memberikan penilaian kepada setiap orang dengan tanggapannya terhadap panggilan ketuhanannya, bukan berdasarkan etnisitas, agama ataupun rasnya”.

#### **4. *Nano Power Diplomacy* dalam Diplomasi Indonesia**

Berbasis dari uraian di atas, baik pergeseran diskursus, ambiguitas diplomasi dan peran *non-state actors*, dasar ideologis dan filosofis, kita akan melihat posisi *Nano Power Diplomacy* dalam diplomasi Indonesia. Dalam rezim Jokowi-JK (2015-2019), basis diplomasi Indonesia mutakhir adalah *down to earth*. Artinya diplomasi yang membumi. Dengan basis diplomasi yang membumi berarti posisi diplomasi Nano dalam slogan *down to earth* mendapatkan posisi yang baik dalam praktik diplomasi Indonesia. Terlepas dari jargon “revolusi mental,” diplomasi Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK secara jelas menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pencapaian melalui jalur diplomasi. Dengan semangat “diplomasi membumi” berarti bahwa diplomasi yang dijalankan oleh warga negara merupakan dalam ikut bersama-sama dengan pemerintah menjunjung payung *social responsibility*, yakni suatu dasar moral yang adil dan beradab bagi penyelamatan bangsa dari persaingan, kekacauan dan anarkhisme internasional. Pelaksanaan diplomasi berbasis revolusi mental yang membumi tersebut, penulis tangkap sebagai peluang untuk berkiprah di dunia internasional. Oleh sebab itu, program studi Hubungan Internasional, Fisip-UNS, sejak tahun 2015 mendesain *Wayang Diplomacy* sebagai wahana jalur privat untuk berdiplomasi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk redefinisi dan reaktualisasi pondasi diplomasi Indonesia yang didasarkan atas *down to earth diplomacy*. Selanjutnya kegiatan, Prodi HI-Fisip-UNS, secara aktif telah

menjalankan *private diplomacy* di berbagai negara, seperti di Bulgaria, Moldova dan Rumania (2015), tahun 2016 di Rusia dan Jepang dan tahun 2017 di India. Kegiatan *private diplomacy* tersebut disemangati oleh kebijakan politik Luar Negeri yang membuka peluang bagi warga negara/*netizen* untuk ikut ambil bagian dalam program diplomasi publik.

Redefinisi adalah sebuah upaya memaknai diplomasi bukan sekadar menugaskan orang-orang yang berstatus diplomat dan duta besar, tetapi juga membuka peluang seluas-luasnya kepada rakyat untuk bermain dalam hubungan internasional. Rakyat dididik dan difasilitasi agar berani dan berkiprah ke luar negeri untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai “diplomat-diplomat” bangsa. Reaktualisasi adalah bentuk pengejawantahan dari revolusi mental yang artinya menggerakkan peran serta masyarakat dalam proyek-proyek diplomasi yang berbasis individual. Dalam hal ini sesungguhnya kekuatannya terletak pada tiga poros utama, yaitu poros akademik, poros pemerintah dan poros swasta. Dengan sinergisnya tiga kekuatan tersebut maka *citizen diplomacy* menjadi sentral pergaulan dunia dengan rakyat sebagai tulang punggung.

Di atas telah dijelaskan bahwa *Nano Power Diplomacy* berbasis ideologi Pancasila. Ini artinya bahwa basis kekuatan diplomasi nano terletak pada keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Berkuasa, berazas kekeluargaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi, keadilan dan persatuan Indonesia. Prinsip diplomasi berlandaskan kekeluargaan tersebut sebagai hal sangat nyata, karena pada dasarnya seluruh umat manusia memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta tanpa memandang agama ataupun kekurangan mereka (Makow, 2015). Uraian tersebut menunjukkan bahwa *Nano Power Diplomacy* memperoleh pijakan yang jelas, baik dalam konteks teoritisasi diplomasi maupun dalam konteks arah kebijakan diplomasi Indonesia.

## B. Terminologi

### 1. Nano

*Nano Power Diplomacy* adalah kekuatan diplomasi yang didasarkan atas aktor nano (*private citizen*), yakni diplomasi yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok kecil, yang merupakan unit aktor terkecil dari elemen diplomasi. *Nano power diplomacy* (NPD) adalah kegiatan yang menekankan aktivitas individu antar warga, *person to person* dan *direct contact*, atau istilah lain adalah *citizen diplomacy*. Dengan kata lain, NPD adalah praktek diplomasi yang mendasarkan pada hubungan sosial-budaya antar warga, suatu diplomasi yang benar-benar diinisiasi oleh individu, yang berbicara secara luas dalam konteks *soft power*, mengenai berbagai bidang, seperti bidang politik, mediasi konflik. Karenanya, NPD adalah *out the mainstream* dari diplomasi tipologi bilateral, multilateral dan *summit meeting*.

Kata “nano” diambil dari bahasa Yunani, *vāvoç*, yang berarti "kurcaci," adalah rekayasa teknologi mutakhir yang berarti sepermilyar ( $1/1000000000$  atau  $10^{-9}$  atau  $0.000000001$ ). Kata nano sering digunakan untuk menyebut pengetahuan mutakhir, seperti "nano-sains," atau sebutan nanoteknologi (Wikipedia, 2017). Jadi, nano adalah jenis atom mikro, yang sangat sangat kecil tetapi fungsinya memunyai kemampuan yang sama dengan atom jenis atom makro. Jadi, *nano power diplomacy* adalah jenis diplomasi kecil, yakni diplomasi yang dilakukan oleh unit yang terkecil dalam hubungan internasional, yakni hubungan antar persona. *Nano power diplomacy* juga dapat disebut sebagai diplomasi kurcaci. Hubungan antar persona memperlihatkan hubungan individu dengan individu, dan hubungan individu dengan kelompok kecil atau publik terbatas. Dalam hal ini berbeda dengan hubungan diplomasi *mainstream*, di sini tidak melakukan tawar menawar politik dan ekonomi dan melalui proses negosiasi yang rumit, namun dasar utama diplomasi berbasis kekeluargaan.

Diplomasi ini adalah diplomasi yang transparan, yang merupakan anti tesa diplomasi tradisional yang penuh rahasia. Oleh karena tiada kerahasiaan, maka juga tidak ditemukan agenda tersembunyi dan hal-hal yang ditutupi (*off the record*) karena setiap partisipan dalam *nano power diplomacy* adalah manusia yang dilahirkan oleh suatu produk

takdir yang sama, yakni Tuhan Yang Maha Pencipta. Para aktor diplomasi nano berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tingkat usia dan konten diplomasi yang berbeda-beda juga. Aktor diplomasi nano adalah mereka yang memunyai kepedulian terhadap negara dan bangsa serta perdamaian dunia.

Konten diplomasi nano menggunakan *platform* yang sama, yakni berkomunikasi secara verbal dan non verbal. Mereka adalah manusia biasa dengan individu yang lain, namun mereka juga memunyai empati dan simpati terhadap orang lain (asing). Di bawah ini akan kami jelaskan mengenai lahirnya konsep *Nano Power Diplomacy*.

## 2. *Power*

*Power* terjemahan yang paling umum adalah kekuatan atau kekuasaan. Dalam hubungan internasional *power* merupakan unsur yang paling esensial dalam mendefinisikan negara yang kuat dan negara yang lemah. Kepemilikan *power* berarti memunyai kekuatan dan kekuasaan yang mengarah pada kepemilikan militer, ekonomi dan teknologi canggih. Dalam paradigma realis, hubungan internasional adalah pertemuan dari negara-negara yang memiliki *power*. Oleh karena itu ada kategori negara adikuasi (*super power*), ada negara berkembang (*middle power*), dan ada negara yang sedang berkembang (*lower power*). *Power* dalam pengertian kekuasaan adalah negara-negara yang memunyai cakupan pengaruh (*sphere of influence*) secara global dan regional. Dalam konsep yang lebih baru yakni kekuatan dan kekuasaan global yang bersifat hegemonik. Hal ini membedakan dengan kekuasaan suatu negara dengan cara mengontrol negara lain melalui agresi, kepasrahan ekonomi dan ketergantungan yang absolut terhadap terhadapnya. Pembagian atau kategori pengelompokkan negara biasanya ditandai dengan persekutuan atau organisasi internasional yang bergabung untuk tujuan yang sama. Kategori global seperti kelompok negara yang tergabung dalam G20, sedangkan kelompok nasional yang berskala regional dan bersifat militer misalnya NATO, beranggotakan negara-negara Eropa Barat. Sebelumnya kita sebut ada Pakta Warsawa yang merupakan kelompok regional yang beranggotakan USSR dengan negara-negara Eropa Timur. Dalam

paradigma liberal, berbeda dengan paradigma realis yang mengutamakan ekonomi dan militer sebagai basis kekuatan, di sini paradigma liberal lebih bersifat saling ketegantungan antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama khususnya dalam perdamaian dan harmoni internasional (Heywood, 2017). Misalnya BRIC (2001) terdiri atas negara Brazilia, Rusia, India, China yang dianggap sebagai pesaing kelompok G-7 yang dikomandani oleh Amerika. Dalam laporan Glodman Sach menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi BRIC diprediksi akan mampu melampui kelompok G-7. BRIC yang dikomandani oleh Rusia, secara jelas ingin mengimbangi kelompok G-7 yang dipimpin oleh Amerika, secara nyata ingin melawan kelompok negara super *power* melalui gerakan merangkul negara-negara berkembang (Heywood, 2017).

### 3. Diplomasi

Diplomasi adalah bertemunya negara-negara di arena internasional dengan damai. Istilah “diplomasi” digunakan untuk menunjukkan adanya pertemuan para wakil negara-bangsa, dari pertemuan biasa yang bersifat informal sampai pertemuan tingkat tinggi. Sebenarnya makna harfiah kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani, berarti kertas atau dokumen yang dilipat. Kertas atau dokumen tersebut merepresentasikan aktivitas para aktor untuk membicarakan agenda pertemuan. Agenda bisa berupa mempertemukan perbedaan pendapat atau untuk menyelaraskan perbedaan. Agenda itu bisa hanya diikuti oleh dua negara (bilateral), bisa juga diikuti oleh banyak negara (multilateral). Diplomasi pada dasarnya adalah seni berunding. *Diplomacy is the art of negotiation, especially of treaties between states. Diplomacy is also political skill.* Diplomasi merupakan aktivitas para aktor yaitu diplomat dan duta besar yang memertontonkan keahlian dan taktik berunding (negosiasi). Taktik berunding yang membincangkan berbagai hal berhubungan dengan perbedaan dan persamaan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan penting demi memertemukan kepentingan bersama. Kegagalan dalam diplomasi sering menimbulkan ketegangan, konflik dan peperangan. Maka dalam arti luas, diplomasi sering disebut sebagai manajemen praktik hubungan internasional melalui negosiasi. Negosiasi adalah

pertemuan para aktor untuk merundingkan berbagai hal dari pertemuan yang sifatnya sekedar seremonial, pertemuan informal sampai dialog dalam pertemuan tingkat tinggi seperti *summit meeting*. Para aktor yang terlibat meliputi utusan resmi negara yang disebut *state actors*, yakni duta besar dan diplomat. Kedua, aktor di luar utusan resmi negara, disebut *non state actors*.

Diplomasi modern sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya telah memperluas para aktor dalam hubungan internasional. Diplomasi modern tidak lagi hanya berbicara pada aktor negara, tetapi para ahli mulai melirik aktor non negara (*non-state actor*). Hal ini disebabkan oleh karena faktanya aktor non negara juga berkontribusi dan berperan dalam membangun order dan tata hubungan internasional. Aktor non negara memainkan perannya sebagai pelaku bisnis internasional, aktivitas seniman, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan sampai aktor dengan skala besar, seperti Non-Governmental Organization (NGO), Multinational Cooperation (MNC) dan International non-Governmental Organization (IGO). Kegiatan diplomasi ditujukan untuk mencapai berbagai kepentingan yang arena kegiatannya berada di luar batas yurisdiksi nasional (Holsti, 1972). Dalam hal pencapaian kepentingan tersebut, pasti harus dapat dibedakan antara kepentingan yang dicapai oleh aktor negara dan aktor non negara. Kepentingan nasional misalnya yang dilakukan oleh aktor negara, pada umumnya dinarasikan ke dalam dokumen kebijakan politik luar negeri. Sementara itu, untuk aktor non negara, makna kepentingan nasional itu sangat beragam. Hal itu berkaitan dengan kepentingan setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda. Meski begitu seluruh kegiatan aktor non negara dalam hubungan internasional, konteks diplomasi udah sangat jelas melekat dalam istilah diplomasi itu sendiri. Dalam hal ini adalah melakukan kegiatan yang berkontribusi bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, pengertian ini membedakan dengan kepentingan aktor non negara hanya untuk kepentingan sendiri.

Dalam *Nano Power Diplomacy*, kegiatan individu secara konseptual adalah aktivitas individu yang ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional, tetapi tidak tercantum dalam dalam lembar kebijakan politik luar negeri. Kegiatan tersebut bukanlah kegiatan liar sebab ada misi

untuk meningkatkan capaian kepentingan nasional secara budaya. Mereka adalah para aktor yang memunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara, yang memikul tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dalam arti luas. Jadi *Nano Power Diplomacy* bukanlah aktivitas individu yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi nasional, seperti aktivitas terorisme dan kejahatan trans-nasional. Untuk membedakan *Nano Power Diplomacy*, *Hard Power Diplomacy* dan *Soft Power Diplomacy* terletak pada instrumen yang digunakan. Aktor negara menggunakan kemampuan militer dan ekonomi serta budaya, disebut sebagai *Smart Power Diplomacy*, sedangkan aktor non negara menggunakan *Soft Power Diplomacy*, sebagai instrumen yang paling fundamental. Aktor non-negara berskala besar dapat menggerakkan instrumen ekonomi dan menjadikan instrumen tersebut untuk *bargaining position* dalam setiap perundingan. Aktor non negara berskala besar memunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi bahkan dapat mengungguli kapasitas dan kapabilitas negara, disebabkan kuatnya jaringan internasional dan ruang lingkup operasionalnya.

Dalam operasional kegiatan diplomasi, baik aktor negara dan aktor non negara keduanya saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Bagi aktor negara dan aktor non negara berskala besar, cara yang ditempuh untuk mencapai kepentingan nasional pada umumnya menggunakan perundingan dan negosiasi tingkat tinggi. Contohnya aktor negara bertugas untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, pertukaran barang dan jasa, menggandeng aktor non-negara berskala besar. Buku ini tidak sedang membicarakan peran aktor negara dan peran aktor non-negara berskala besar, tetapi lebih spesifik membahas tentang aktor non negara berskala nano, yakni aktivitas individu dalam diplomasi, baik dilakukan secara sendiri maupun dilakukan dengan bekerja sama dengan aktor negara atau aktor non-negara berskala besar. Buku ini membahas tentang aktor non-negara yang paling terkecil (nano) yaitu aktivitas individu. Oleh sebab itu, skala atau ruang lingkupnya juga berskala kecil, seperti aktivitas seni dan budaya di tempat umum, aktivitas individu dalam festival, atau aktivitas individu pada pameran buku, pameran produk kerajinan dan produk seni lainnya. Dalam konteks tersebut, diplomasi sebagai seni bernegosiasi, bermakna pada

aspek konektivitas sosial-budaya, yakni melalui kontak langsung, *people to people contact*, maupun konektivitas dengan publik. Boleh dikatakan bahwa kegiatan diplomasi nano tersebut berada pada konteks *low-politics*, atau *soft power*, yakni mencapai kepentingan nasional menggunakan opini, persuasi, menarik simpati dan empati publik asing. Dengan demikian, diplomasi nano bukanlah pengertian yang disebutkan oleh Kautilya dalam Purwasito (2011), yang membagi diplomasi dalam empat pilar. Pandangan diplomasi menurut Kautilya lebih cocok sebagai diplomasi tradisional, yakni diplomasi diperankan oleh aktor negara.

Dalam konteks kegiatan diplomasi aktor negara, Kautilya menyebut diplomasi terdiri atas empat pilar: Pertama diplomasi sebagai bentuk *acquisition*, yakni suatu tujuan yang mengembangkan hubungan baik antar negara, dicapai melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Pilar kedua diplomasi sebagai upaya *preservation*, yaitu suatu upaya untuk saling memelihara hubungan baik negara-negara agar memperoleh manfaat atas kerjasama internasional. Pilar ketiga diplomasi adalah *augmentation* adalah tujuan yang diarahkan untuk meningkatkan keuntungan di atas rata-rata. Pilar keempat adalah *proper distribution*, adalah tujuan diplomasi untuk menjaga hubungan harmonis dan berkeadilan dalam berbagai aspek termasuk melindungi warga negara di negara asing (S.L, 1991).

Dari uraian di atas maka diplomasi dianggap sebuah seni bernegosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam beberapa kamus menyebutkan bahwa diplomasi sebagai "*the art and practice of conducting international relations, as negotiating alliances, treaties and agreements* (Heritage, 2011). Diplomasi merupakan aktivitas negosiasi juga sebagai teknik atau keahlian, bahkan menggunakan tipu daya antara orang-orang untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak yang berunding (Butterfield, 2003). Para aktor diplomasi (*a person engaged in diplomacy*) yang mewakili negara-negara disebut dengan ambassador dan diplomat. Mereka menjadi wakil negara berdaulat untuk merundingkan berbagai aspek kepentingan dalam arena hubungan internasional, seperti perundingan perang dan damai, kesepakatan dalam bidang perdagangan dan kerjasama ekonomi, termasuk bidang kesehatan, Hak-hak Azasi Manusia (HAM), *trafficking* (perdagangan manusia),



terorisme, aspek lingkungan, maupun aspek sosial, seni dan budaya. Diplomasi sebagai seni berunding, *the art or science of conducting such negotiations*, memuat dua ungkapan dalam negosiasi, yakni konsep dialog (*dialogue*), dan konsep pembahasan (*talks*) (House, 2000). Maka tepat kiranya diplomasi disebut sebagai motor penggerak dalam hubungan internasional. Diplomasi adalah manajemen hubungan internasional yang berperan mengendalikan order atau sistem internasional yang stabil, setara dan berkeadilan. Namun demikian, oleh karena dalam diplomasi setiap aktor selalu mengedepankan kepentingan masing-masing, maka tidak heran apabila taktik atau cara untuk memenangkan setiap negosiasi sering menggunakan cara-cara yang bersifat paksaan, ancaman, bahkan tipu muslihat, *the patriotic art of lying for one's country*.

Dalam carut marut hubungan internasional, teori diplomasi sendiri sangat multiperspektif dan biasanya bergantung pada konteks paradigmatis studi hubungan internasional. Paradigma yang dominan dalam teori hubungan internasional adalah paradigma realis, liberalis, komunis dan konstruktivis. Maka, untuk mempelajari teori diplomatik dibutuhkan pendekatan yang bersifat eklektik atau multiperspektif tersebut. Dalam buku ini, pembahasan diplomasi disoroti secara kontekstual dengan kondisi dan fenomena dunia paling mutakhir, yakni diplomasi digital. Berangkat dari analisis kontekstual, kami memunyai kesempatan untuk membangun landasan yang kuat tentang teori diplomasi, yakni peluang untuk membandingkan diplomasi antar paradigmatis serta mengevaluasi adanya bentuk-bentuk teori baru.

Sikap ini membutuhkan sikap yang saling menghormati antar paradigmatis sehingga kita terbuka untuk mempelajari diplomasi secara holistik. Dengan begitu tidak mengunggulkan satu paradigma dibandingkan dengan paradigma yang lain. Kita perlu menimbang bobot secara adil dan menganggap semua paradigma hubungan internasional memiliki andil dan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pemahaman kita tentang lingkungan diplomatic abad ke 21. *No one theory is held to be better than the other. All have equal weight; all have a valuable and specialised contribution to enhance understanding of the 21st century diplomatic environment.*

## C. *Nano Power Diplomacy*

### 1. Pergeseran Diskursus dari *State Actors to Non State Actors*

Desain diplomasi yang kita kenal sekarang lebih sering dikaji melalui paradigma Thomas Hobbes, Karl Marx dan Hans J. Morgenthau, yakni paradigma realisme. Paradigma ini kemudian menjadi pemikiran fundamental bagi banyak akademisi studi hubungan internasional. Di Indonesia, paradigma realisme begitu terkenal oleh karena buku-buku referensi yang ada seperti karya Hans J Morgenthau, *Politics Among Nations* (1958) atau karya-karya Henry Kissinger, *Order of Internasional Relations*, dll telah memberi banyak pelajaran kepada akademisi Indonesia tentang sistem hubungan internasional sebagai relasi antar bangsa yang bersifat hierarkhis, hegemonik dan anarkhis. Keduanya sepakat bahwa hubungan internasional memiliki kompleksitas relasional, yakni beragamnya kepentingan nasional dari masing-masing negara saling berbenturan. Jadi setiap aktor internasional akan selalu berhadapan satu sama lain sehingga arena internasional merupakan arena pergulatan untuk memenangkan setiap kompetisi. Bagi Morgenthau, modal utama untuk bertransaksi dalam arena internasional adalah *national power*. *National power* yang dimiliki oleh suatu negara sangat menentukan keberhasilan negara tersebut dalam mencapai kepentingan nasional di luar negeri. Kepemilikan *power*, baik luas wilayah, sumber daya manusia, sumber daya alam, penguasaan teknologi, kualitas diplomasi dan karakter suatu bangsa, menentukan kejayaan bagi suatu negara. Bagi Henry Kissinger, hubungan internasional adalah arena yang membutuhkan saling pengertian dan penghormatan antar aktor, yang tercermin dalam tiga konsep konsep utama, yaitu legitimasi, konsensus dan ketertiban. Dengan penghormatan dan pengertian antar aktor itulah yang menyumbang bagi perdamaian. Jadi, Kissinger lebih menyukai dan mendahulukan kebersamaan dan kekeluargaan daripada relasi yang bersifat *coercive* karena sering menimbulkan ketegangan-ketegangan. Penghormatan, pengakuan, konsesus dan saling menjaga ketertiban adalah modal utama untuk mencapai hubungan internasional yang produktif. Sesungguhnya Henry Kissinger adalah seorang realis yang percaya bahwa aktor utama

dalam hubungan internasional adalah negara, suatu entitas politik yang menguasai wilayah dan militer. Secara eksplisit dia yakin bahwa eksistensi negara dalam hubungan internasional didasarkan atas terjaganya keamanan nasional sebagai basis relasional dengan negara-negara lain. Hal ini ia tunjukkan dalam hubungan internasional di masa perang dingin dimana dua kekuatan yang saling berhadapan yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Aksi itu tidak lain adalah kompetisi pertahanan dan keamanan. Karenanya ia yakin bahwa keamanan internasional harus berlandaskan keseimbangan kekuatan antar aktor sebab apabila salah satu lebih kuat maka kecenderungannya justru membahayakan dunia. Sebagai seorang konsultan politik luar negeri AS, ia selalu menekankan pentingnya kesepakatan dan perundingan nuklir sampai batas yang paling rendah. Perundingan pembatasan senjata nuklir adalah pendekatan keamanan yang digunakan oleh Kissinger agar mencapai keseimbangan kekuatan (Ferguson, 2015). Dengan *balance of power* tersebut, Kissinger yakin bahwa pendekatan internasional yang paling efektif adalah bersifat *defensive* dan menjauhkan diri dari tindakan kekuatan yang bersifat koersif dan ofensif. Uraian di atas kita melihat bahwa Kissinger juga mengedepankan diplomasi sebagai cara untuk menghindarkan kehancuran bagi semua aktor. Jalan diplomasi yang dia maksudkan adalah *détente* (yakni peredaan ketegangan). Jadi, penggunaan kekerasan dan ancaman hanya digunakan pada pilihan paling akhir (Lishingman, 2000).

*He was responsible—to name only his most obvious achievements—for negotiating the first Strategic Arms Limitation Treaty (SALT I) and the Anti-Ballistic Missile Treaty with the Soviet Union. While he held office, the United States ratified the nuclear arms Non-Proliferation Treaty, the international convention banning biological weapons, and the Helsinki Final Act, Article 10 of which (little though Kissinger liked it) committed signatories on both sides of the iron curtain to “respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion or belief, for all without distinction as to race, sex, language or religion.”*

Dalam penjelasan di atas tampak sekali bahwa ada semacam ketakutan terhadap kehancuran bersama apabila benar-benar terjadi perang nuklir. Oleh sebab itu, Kissinger menekankan bahwa moderasi dan fleksibilitas harus memandu semua hubungan internasional.

Paradigma realis yang mendominasi studi hubungan internasional di masa perang dingin selalu memprioritaskan negara kebangsaan sebagai pelaku utama karena negara merupakan manifestasi dan representasi dari rakyat. Implementasinya, tindakan politik dan kebijakan aktor negara secara rinci diformulasikan dalam kebijakan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah pencapaian kepentingan nasional di luar batas yurisdiksi nasional. Para pelaku yang menjalankan politik luar negeri adalah Menteri Luar Negeri (*Ministry of foreign affairs*), ambasadior dan para diplomat. Mereka bekerja bersama diplomat dalam rumah Indonesia di negeri asing yang disebut Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jendral. Dengan cara berpikir paradigmatis seperti itu, seringkali kita menyimpulkan bahwa hubungan internasional adalah arena medan perjuangan dengan hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat (*dominan*) itulah yang menang. Morgenthau memformulasikan *international relations* sebagai *Politics among Nations*, dan di dalamnya setiap negara berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (*struggle for power*). Sementara mari kita berhenti di situ. Mari membuka membuka dunia lebih luas atau menggeser diskursus dari realisme dan liberalisme ke dalam diskursus konstruktivisme. Secara sederhana mari berpikir untuk tidak selalu menempatkan hubungan internasional pada *power* raksasa dan *power* kurcaci. Kita perlu berpikir bahwa hubungan internasional bukanlah eksploitasi *power* untuk mencapai puncak *super power*. *Politic among Nations* bukan saja berisi tentang *state actors*, tetapi juga berisi aktor non negara. Mereka adalah aktor yang tidak merepresentasikan secara resmi sebagai representasi negara. Jadi aktor non negara yang dimaksud sangat kompleks, dari organisasi bisnis yang besar seperti Multinational Cooperation, Perserikatan Bangsa-bangsa, sampai organisasi Nir Laba, seperti Non Governmental Organization (NGO) dan International NonGovernmental Organization. Tidak hanya itu, ada juga individu sebagai warga negara dan diasporan. Keseluruhan itu adalah *non-state actors*. Tujuan aktivitas dari aktor non negara bisa bermacam-macam. Di satu sisi merepresentasikan sebagai wakil negara yang bekerja demi kepentingan nasional, sedangkan aktivitas aktor non negara yang lain, mungkin saja bertujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bahkan bisa jadi menjadi resisten terhadap

negara. Aktivitas aktor non negara yang lain, seperti NGO Green Peace, misalnya lebih mendasarkan tujuan untuk kepentingan publik dunia.

Penggeseran tersebut telah dimulai sejak Joseph Nye mencatat bergesernya teori realis yang semakin terkikis oleh hadirnya aktor-aktor politik non-negara, seperti swasta dan organisasi non-pemerintah. Aktor non-negara, seperti NGO dan MNC, dianggap semakin penting, apalagi digandeng oleh pemerintah untuk menjalankan diplomasi dalam hubungan internasional. Partisipasi publik dalam wilayah internasional memengaruhi pandangan kita terhadap politik domestik dan politik internasional. Hal tersebut dapat dilihat seberapa besar aktor-aktor transnasional terlibat dalam urusan pemerintahan dan seberapa besar norma-norma hukum humaniter internasional menerabas masuk ke kedaulatan negara (Junior, 2009). Beberapa buku telah memopularkan *soft power* sebagai perangkat diplomasi yang penting guna mendukung operasi militer dan agenda keamanan nasional. *“Diplomacy thus plays a major role complementary to the military in the capacity to exert international influence. Within these broad overarching themes, the tools of influence—diplomacy, public diplomacy, cultural relations and strategic communication—exist to support the security agenda”* (Pamment, 2016). Dalam banyak diskursus, para ahli mementingkan aktor-aktor non negara berskala besar, seperti NGO digambarkan sebagai Nascent Theory of Diplomacy bahwa *“NGOs are now an intrinsic part of the modern political lanscape and have become ‘active in political work once reserved for representatives of state”* (Stuart, 2006). Sejak Perang Dingin, peranan dan praktek NGOs dalam arena internasional semakin penting seiring semakin kompleksnya persoalan internasional. Aktor non-negara menggeser aktor negara sebagai aktor politik internasional. Tindakan politik aktor non negara diasumsikan sebagai *“more flexible, reponsive and effective than the archaic state and its overly bureaucratic diplomatic system.”* Dalam banyak hal justru NGOs dianggap sebagai aktor yang lebih mewakili kepentingan langsung daripada peran Pemerintah (*NGOs are more representative than national governments*). Baik dalam berhubungan dengan *International non-Governmental Organization* maupun dengan aktor-aktor lain non-negara.

Dalam buku ini peran masyarakat sipil yang dimaksud adalah bagaimana hubungan internasional melahirkan *global civil society*. Suatu masyarakat sipil yang secara mandiri melakukan hubungan internasional secara bertautan dan berkesinambungan. Kita melihat bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, aktor diplomasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan dinamika perkembangan teknologi informasi, *booming* ekonomi, dan ditemukannya alat transportasi canggih. Berkat kehadiran teknologi, proses hubungan internasional semakin tercepat, akselerasi sejarah terjadi sangat dahsyat (Purwasito, 2015). Kepentingan golongan, kepentingan kelompok maupun kepentingan individu dicapai melalui hubungan internasional yang tidak lagi mempertimbangkan batas-batas kedaulatan negara. Konsekuensinya, negara sebagai aktor dalam hubungan internasional jauh ketinggalan oleh aktor-aktor di non-negara. Namun, prestasi dan efektivitas diplomasi personal ini jarang dikaji oleh para ahli. Kita mengenal diplomasi aktor non-negara sebagai trek kedua, dalam terminologi diplomasi multi-trek (*multi-track diplomacy*). Aktor non-negara menjalankan diplomasi mulai dari trek ke 2-9: yakni *track one: Government, track two: Non-government/ Professional, track three: Business, track four: Private Citizen, track five: research, Training, and Education, track six: Activism, track seven: Religion, track eight: Funding, track nine: Communications and Media* (Diamond, Louise ; McDonald, 1996).

Louise Diamond dan John McDonald adalah dua ahli HI sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat untuk bidang pembangunan perdamaian. Keduanya mengembangkan pendekatan sistem pemikiran untuk perdamaian yang mana jauh sebelum orang lain memikirkannya. Pemikiran mereka populer disebut sebagai konsep "diplomasi multi-jalur" (*multitrack diplomacy*) dan menggambarkan cara kerja HI melalui sembilan jalur berbeda untuk tujuan yang sama. Aktor negara dan non negara memiliki jalur masing-masing yang saling bekerja bersama untuk menciptakan "sinergi" bagi pengembangan perdamaian yang stabil. Dengan kata lain, tujuan nasional biasanya tidak dapat dicapai secara terpisah tetapi seluruh trek berjalan secara sinergis. Konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John McDonald yang tadi disebut *multi-track diplomacy*. Mereka berada

pada Institute for Multi-Track Diplomacy yang sampai sekarang mengaji tentang strategi pembangunan perdamaian. Selanjutnya Anda dapat memelajari tentang pemikiran sistem tersebut di situs web mereka, yaitu [IMTD.org](http://IMTD.org). Dari situs web tersebut kita akan memperoleh informasi dan tokoh-tokohnya serta pemikiran mereka tentang dunia menuju perdamaian melalui sembilan jalur. Penulis sendiri mengatakan bahwa *multitrack diplomacy* adalah bagian dari sistem konflik dan perdamaian. Mereka berbicara tentang sistem internasional dengan cara yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh para ahli teori sistem lainnya. *Multitrack diplomacy* sendiri merupakan sistem pengorganisasian yang longgar yang memiliki elemen yang mengalir sesuai dengan lingkungan masing-masing. Setiap elemen dalam *track* memiliki sumber daya yang unik, nilai yang berbeda, mungkin juga memunyai tujuan yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Tapi pada akhirnya seluruh jalur tersebut berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, dalam *track* bisnis biasanya misi perdamaian kurang mendapat perhatian oleh karena tujuan bisnis adalah untuk menghasilkan uang. Pada *track* lembaga swadaya masyarakat yang didukung oleh para aktivis, biasanya bukan untuk berdamai tetapi untuk memenangkan pihak mereka. Para penyandang dana biasanya, atau setidaknya sering, memiliki tujuan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi cara mereka mendefinisikannya berbeda. Pendekatan yang mereka gunakan berbeda. Mereka datang dengan sumber daya yang berbeda. Tetapi tidak satupun dari mereka sendiri yang dapat menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Ketika semua jalur tersebut bersinergi, bekerja bersama-sama, sehingga mereka membangun sinergi “Diamond” sebagai pendekatan sistem untuk perdamaian. Pada kenyataannya, seperti ahli teori sistem lainnya yang menyadari adanya kelonggaran dalam sistem sinergi tersebut sehingga tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap satu hal dan masing-masing elemen berdiri secara mandiri sehingga tidak ada yang mengatur dan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara faktual setiap jalur menjalankan misi masing-masing, dan oleh karenanya mereka membuat keputusan sendiri, untuk alasan mereka sendiri, untuk tujuan mereka sendiri. Tetapi

ketika mereka semua berinteraksi, mereka dapat melakukannya dengan cara yang mengarah pada perdamaian yang lebih besar atau bersama-sama untuk meredakan konflik yang ada dalam arena internasional. Kesimpulannya, meskipun dari seluruh *track* tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan misi mereka, namun dalam praktik perdamaian mereka bekerja secara sinergi untuk meningkatkan perdamaian agar lebih stabil. Dalam hal ini, setiap *track* memunyai kesepahaman serupa tentang gagasan, peran dan cara-cara untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.

Pergeseran diskursus tersebut sangat kuat jika dilihat dari karakter lintas disiplin keilmuan HI. Dalam konteks ilmu sosial global transformasi global atas kekuasaan negara dan tindakan politik harus menjadi landasan analisis (Shaw, 2012) . Dalam hal tindakan politik, itu artinya aksi yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non negara sesungguhnya dilakukan oleh orang persorangan, di satu pihak representasi negara di pihak lain tidak menjadi representatif.

Tindakan politik aktor diplomasi oleh aktor non-negara adalah unit analisis yang vital. Meskipun tindakan tersebut tidak seluruhnya dapat diamati atau dilacak. Dalam beberapa hal keberadaan dan posisi pelaku HI sangat sulit dilacak (*grey area*). Sebagaimana dalam peristiwa tragis 9 September 2001 yang menghancurkan 2 gedung kembar WTO, sampai hari ini pelakunya tidak mampu ditemukan baik oleh para ahli, peneliti maupun penyidik kepolisian. Contoh tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa pelaku dalam tindakan politik sangatlah rumit. Seperti yang telah disebutkan di muka, peristiwa tersebut sudah jelas merupakan keterkaitan dengan aktor bayang-bayang (*the puppet shadow*), Anonimus. Apakah penyerangan tersebut dilakukan oleh aktor negara ataukah oleh aktor non negara, kita hanya dapat melacak bentuk dan tujuh ciri sebagaimana dijelaskan di depan. Adanya unsur tindak kekerasan sebagai tindakan politik adalah jelas adanya keterlibatan Anonimus. Karena bersifat anonim maka niat dan motif aktor pelaku, kepentingan dan tujuan aktor sulit diketahui dan dimengerti. Maka tidak mengherankan apabila tragedi kemanusiaan 9/11 sampai kini tetap menjadi misteri.



Dari uraian di atas, aktor-aktor non negara yang dibagi dalam beberapa jalur tersebut juga sebagai aktor pelaku diplomasi untuk berbagai tujuan dari kepentingan bisnis, misi kemanusiaan sampai pembangunan perdamaian internasional (*international peacemaking and peacebuilding*). Pergeseran diskursus terhadap aktor pelaku HI, dari aktor negara ke aktor non negara, setidaknya memberi kontribusi penting dalam menggerakkan perubahan internasional dan mendinamisasi sistem dan orde internasional. Dengan cara pandang tersebut maka upaya memertahankan peradaban manusia yang makin terancam oleh upaya penjungkirbalikan ideologi dan agama semakin nyata dan penting. Studi HI perlu meluruskan gerakan dan perilaku Anonimus, yang faktanya mengarah pada upaya penggeseran nilai-norma adi luhung menjadi norma dan nilai neo-liberalisme. Peran aktor non negara, dalam hal ini direpresentasikan Punakawan yang sangat lincah memainkan peran penghadangan atau resistensi terhadap hegemoni ideologi Anonimus, yang berusaha membuang nilai dan norma sosial-budaya lokal dengan cara menghancurkan norma dan nilai dasar manusia. Dengan meningkatnya ujaran kebencian untuk adu domba, propaganda anti agama telah memancing sensitifitas etnik-rasial, religious, maka semakin penting peran aktor non-negara yang paling kecil saling bertautan dan berkesinambungan.

## **2. *The Soft Power dan Non-State Actors***

*Power* adalah faktor penting dalam hubungan internasional. Baik *state actors* maupun *non-state actors*, keduanya memiliki *power* dengan unsur-unsur yang berbeda-beda. Bagi *state actors*, *power* dalam diplomasi sering diterjemahkan dalam *hard power diplomacy* dan *smart power diplomacy*. Kedua *power* diplomasi tersebut secara faktual dimiliki oleh actor negara. Meskipun *non state actors* yang berskala besar, seperti organisasi internasional multilateral (MNC), PBB, persekutuan militer seperti NATO, perusahaan trans-national (MNC), institusi keagamaan seperti Gereja Katolik Roma, termasuk perusahaan global berbasis teknologi mutakhir seperti Google, Yahoo, Tweeter, Youtube, dan Facebook, memiliki kemampuan *power* yang besar. Akan tetapi *power* itu tidak lagi didominasi oleh State Actors. *Power* tidak hanya

bersumber dari kekuatan militer dan ekonomi, namun juga dari kekuatan nilai sosial-budaya. Sumber power social-budaya merupakan kekuatan lunak yang disebut sebagai *soft power* yakni nilai-nilai dan norma kehidupan sebuah bangsa, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai demokrasi, nilai budaya (Junior, 2009). *Power* adalah sarana untuk menghadapi tantangan masa depan terutama memasuki era informasi global (*How we can increase and take advantage of the power that emanates from our deepest values and how we should face the principal challenges that confront us in a global information age*).

Kepemilikan *soft power* tersebut dimiliki oleh ke dua aktor internasional khususnya dalam pemilikan aktor non-negara di panggung internasional yang mengalami perkembangan yang dramatis, terutama meningkatnya jumlah NGO dari 6000 menjadi 26.000 selama tahun 1990 (Junior, 2009). Hal ini menunjukkan adanya gerakan massif dari masyarakat non negara yang mengambil bagian dalam hubungan internasional dan diplomasi .Banyak organisasi non-pemerintah mengklaim bertindak sebagai "hati nurani global" yang mewakili kepentingan publik yang luas di luar lingkup masing-masing negara. Mereka mengembangkan norma-norma baru secara langsung dengan menekan pemerintah dan pemimpin bisnis untuk mengubah kebijakan, dan secara tidak langsung dengan mengubah persepsi publik tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Dalam hal sumber daya, kelompok-kelompok baru ini jarang memiliki banyak *hard power* (walaupun perlu dicatat bahwa anggaran Greenpeace pada tahun 2001 adalah \$157 juta, dibandingkan dengan anggaran antar pemerintah Organisasi Perdagangan Dunia sebesar \$90 juta). Bagaimanapun, revolusi informasi telah sangat meningkatkan *soft power* LSM. Karena mampu menarik pengikut, pemerintah harus memperhitungkan LS sebagai sekutu dan musuh. Dari sudut pandang Amerika, perlu dicatat bahwa Brussel, London, dan Paris berada di atas Washington dan New York sebagai kota tuan rumah bagi organisasi non pemerintah internasional. Dalam dunia yang semakin kompleks dan multilateral, jumlah kontak transnasional mengalami peningkatan, termasuk penyebaran ideologi ekstrim. Berbagai organisasi nirlaba yang berskala besar, memiliki dana yang juga besar yang memainkan peranan yang besar pula, seperti gereja

Katolik Roma, yang menyokong individu dan masyarakat luas. Mereka mampu menembus negara tanpa memandang batas dan cukup efektif hasilnya. Hal ini oleh Nye dipandang sebagai kontribusi dan keterlibatan warga negara yang ditempatkan dengan baik dalam politik domestik beberapa negara. Menurutnya, jaringan semacam itu mampu memusatkan perhatian media dan pemerintah untuk mengembangkan dan mengontrol isu-isu yang mereka inginkan. Misalnya menciptakan koalisi politik global dengan membawa isu baru transnasional, seperti koalisi pelarangan ranjau darat menyatukan LSM, selebriti, dan politisi di banyak negara (Junior, 2009).

Revolusi informasi telah mendiskreditasi negara Adikuasa karena dengan adanya internet para pembuat berita yang notabene aktor non-negara mampu membangun isu besar untuk menggoyang negara tersebut. Laporan dari Human Right Watch di tahun 2003 telah memperlihatkan kritik yang keras terhadap AS karena upaya perang melawan terorisme dianggap sebagai Gerakan yang sia-sia. Pada tahun tersebut setidaknya ada 288 surat kabar dunia mengabarkan tentang aksi AS terhadap teroris. Hal ini menunjukkan bahwa LSM, seperti Amnesty International, Palang Merah Internasional, Greenpeace, Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières), dan Transparency International, kini tidak diragukan lagi telah mampu memengaruhi opini public dunia. Menurut Nye, LSM berskala besar tersebut telah berani mengkritik AS, bahkan menggagalkan perjanjian multilateral tentang investasi AS di tahun 1990. Terjadinya “perang Seattle” di tahun 1999 tidak lain adalah gangguan yang dilakukan oleh LSM melalui *platform* internet terhadap konferensi tingkat tinggi (KTT) Organisasi perdagangan dunia. Dalam hal ini, Pentagon yang menentang pelarangan ranjau darat di satu sisi, di sisi lain LSM yang berbasis internet telah berhasil menjalin dengan pemerintah *middle power*, seperti Kanada dan juga bersinergi dengan kekuatan nano seperti Lady Diana yang telah berhasil mewujudkan pelarangan terhadap ranjau darat pada tahun 1997. AS juga pernah menolak Konvensi Pengendalian Tembakau, tetapi akhirnya menerima oleh karena kritikan internasional, yang mana konvensi tersebut diratifikasi oleh 192 anggota Organisasi Kesehatan Dunia. Nye juga mencatat bahwa dalam diplomasi nano, fasilitasi internet tidak dapat dipisahkan

dari penggunaan *soft power* oleh kaum diaspora di luar negeri. David Bollier yang ahli dalam bidang teknologi digital menyebut bahwa internet telah menjadi anugerah bagi populasi dunia karena mereka dapat membangun jaringan dan komunitas virtual yang besar, meskipun letak geografisnya terpisah. Hal itu terbukti dengan protes dari warga China di Beijing karena migrasi orang-orang China yang tinggal di Indonesia dipindahkan ke Beijing, karena kerusuhan anti-cina di tahun 1988. Salah satu contoh kelompok diaspora Ghana (ekspatriat Ghana) yang ada di luar negeri, secara efektif menggunakan internet dan sumber media lainnya untuk memengaruhi hasil politik di negara asalnya. Dalam pemilihan tahun 2000, nyata pertama bagi rakyat Ghana untuk menjalankan Pemilu secara demokratis. Hal tersebut berkat jaringan diaspora di luar negeri yang mampu memobilisasi dukungan dan uang untuk calon dari oposisi. Gerakan diaspora Ghana yang tergabung dalam GCG (Ghana Cybergroup, 1999) di New York, berhasil memobilisasi diaspora di AS agar AS dengan keluarganya di Ghana telah melahirkan kekuatan baru. Kekuatan tersebut telah berhasil menggalang dukungan dana dan investasi dari luar negeri ke Ghana.

Apa yang telah diuraikan di atas menandakan peran aktif aktor non negara berskala besar. LSM internasional telah menjelma menjadi kekuatan baru. Selain pemilikan *soft power* yang bervariasi, perkembangan LSM menunjukkan kredibilitas organisasi, anggaran, dan keakuratan isu-isu yang dikembangkan serta akuntabilitasnya. Maka tidak heran jika 42% orang Eropa cenderung mempercayai LSM ketimbang 36 yang tidak percaya. Menurut Nye, hanya di Inggris dan di Jerman citra LSM cukup rendah dibandingkan dengan citra Pemerintah. Sementara itu, PBB sebagai lembaga non negara yang kuat telah kehilangan reputasinya dalam menangani konflik politik internasional ketika PBB hanya diam menghadapi serangan AS terhadap Irak. PBB melalui Dewan Keamanan seharusnya memberi resolusi terhadap serangan tersebut. Hal ini menyebabkan mayoritas di 19 dari 21 negara yang disurvei mengatakan bahwa PBB tidak lagi penting sebelumnya dalam berurusan dengan konflik internasional. Nye juga menyebut bahwa *soft power* juga dapat digunakan oleh organisasi dan jaringan internasional yang jahat. Organisasi teroris

transnasional seperti Al Qaeda sangat dibenci oleh dunia, namun bagi kaum ekstremis Gerakan Al Qaeda justru sangat menarik. Pada waktu perang dingin, *soft power* paling berbahaya datang dari Uni Soviet dan komunisme. Namun tantangan AS pada dewasa ini adalah ideologi dan organisasi Islam radikal.

Munculnya Islamisme radikal, seperti Wahabisme, telah dibantu oleh Arab Saudi, yang dianggap oleh Nye sebagai cara membeli legitimasi politik mereka sendiri dengan mengorbankan stabilitas di tempat lain. Hal itu karena pendanaan lembaga Wahabi berasal dari kementerian pemerintah Saudi dan badan amal swasta, hampir tidak mungkin untuk memperkirakan total pengeluaran. Seorang ahli bersaksi kepada kongres bahwa Saudi telah menghabiskan sekitar \$70 miliar untuk proyek-proyek bantuan sejak tahun 1970-an, dan yang lain melaporkan bahwa mereka mensponsori 1.500 masjid dan 2.000 sekolah di seluruh dunia dari Indonesia hingga Prancis. Nye menulis sebagai ironi sebab *soft power Wahhabisme* belum terbukti menjadi sumber daya yang dapat dikendalikan atau digunakan oleh pemerintah Saudi untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Justru tawar-menawar keluarga kerajaan dengan ulama Wahhabi menjadi boomerang boomerang sebab *soft power* radikalisme Islam justru mengarah ke Osama bin Laden dan tujuannya untuk menggulingkan kerajaan. Ia agak heran ketika Indonesia, Yordania, Pakistan, Maroko, dan Otoritas Palestina mengatakan bahwa mereka sangat percaya pada Osama bin Laden. Mereka lebih percaya pada Osama ketimbang George W. Bush atau Tony Blair. Itu artinya Osama menginspirasi negara-negara Islam melalui pesan *soft power*, terbukti nama "Osama" menjadi populer untuk bayi laki-laki di Afrika dan Pakistan. Oleh sebab itu, AS harus menunjukkan sikap yang tegas untuk membendung *soft power* kaum islamis, karena menurut Nye dapat mengganggu bagi citra AS di mata dunia. Dalam hal ini, AS mendukung dan berusaha untuk menerapkan kebijakan agar peradaban Islam menjadi lebih moderat. Akhirnya Nye menyimpulkan bahwa era informasi akan meningkatkan *soft power* aktor non-negara, terutama meningkatnya kekuatan individual (elemen nano), dan ia menyarankan agar AS berinvestasi yang lebih besar dalam sumber daya *soft power*nya, dan belajar menggunakan kekuatan lunaknya secara lebih efektif.

### 3. Nano Power Diplomacy

Kondisi percaturan politik global yang anarkis dan hierarkis membutuhkan inovasi teori dan pendekatan yang baru, termasuk diplomasi yang kita bahas dalam buku ini. Kompleksitas hubungan internasional perlu dibarengi dengan konsep keilmuan yang memadai. Studi HI wajib bertumpu pada dasar falsafah kehidupan yang lurus, lintas-antar disiplin, dengan pisau analisis yang komprehensif. Untuk hal tersebut, buku ini menawarkan dua desain diplomasi *out of the mainstream*, yaitu *nano power diplomacy*, dan kedua *conjungturel diplomacy*. Keduanya bertumpu pada kenyataan bahwa hubungan internasional kompleks, heterogen, eklektif, multi/antar disiplin serta dinamis. Karakter tersebut jelas terdapatnya tema-tema diplomasi yang kompleks juga. Sisi lain dari paradigma realis adalah paradigma idealistik yakni paradigma yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Dua desain tersebut di atas adalah analisis diplomasi dari sudut *scope of interest* untuk *nano power diplomacy* dan kedua dari sudut *focus of interest* untuk *conjungturel diplomacy*. Kehadirannya dua desain diplomasi tersebut selain kondisi hubungan internasional semakin kompleks, perilaku aktor dan hubungan aktor-aktor transnasional dan interdependensi semakin kuat, Nye menyebut sebagai *complex interdependence*, membutuhkan pemahaman dan pendekatan yang lebih luas, baik dari pendekatan klasik realisme, liberalisme, maupun sampai pendekatan konstruktivisme, termasuk pendekatan historis dan organisatoris.

*Nano power diplomacy* dan *conjungturel diplomacy* tersebut hadir oleh dorongan mengisi perspektif lain dari sekedar yang dilakukan Morgenthau dan Karl Marx, yakni hubungan internasional sebagai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, *struggle for power*. Selain itu, keduanya diharapkan dapat mengatasi sebagian dari kekacauan dalam konsep, kaburnya kepercayaan, tumpang tindihnya teori, bahkan kegalauan dalam standar etika, estetika, sampai upaya untuk mengatasi kejelasan nyata atas idealisme versus realisme, anarkhisme versus neo-liberalisme. Selama ini *focus of interest* kita berkutat seputar *struggle for power* dalam arena internasional dan *struggle for class* dalam

arena domestik. Hasil akhir dari cara pandang tersebut adalah diciptakannya ruang liar HI yang disebut model sistem hutan rimba. Dengan begitu, dua desain tersebut diharapkan mampu memberi alternatif lain *focus of interest* kita tentang hubungan internasional sebagai sistem kemanusiaan yang hakiki, yakni ruang belajar bagi manusia untuk menerapkan keadilan, rasa aman dan keberagaman.

Berangkat dari paradigma Marx dan Morgenthau, kita mendapati berbagai teori hubungan internasional yang berbasis konflik, resistensi dan hegemoni. Paradigma realis dan struktural telah membawa kita pada kesimpulan bahwa panggung HI hanyalah berisi sifat dan perilaku aktor yang dihindangi oleh nafsu serakah. Panggung HI berisi aktor yang rakus dan jahat. Para aktor saling berhadapan satu sama lain sehingga panggung HI seperti panggung wayang dimana ada dua pihak yang saling berhadapan. Maka teori HI pada umumnya menjelaskan tentang (1) pihak yang kuat berhadapan dengan pihak yang lemah, (2) pihak yang dipusaran terdalam dengan pihak yang berada di luar pusaran, (3) pihak yang berada di pusat dan pihak yang ada di pinggiran, (4) pihak yang bersekutu dengan pihak yang tercerai berai, (5) pihak yang aktif dengan pihak yang pasif, (6) pihak yang bermain dengan pihak yang teralienasi, (7) pihak yang menang dan hegemonis dengan pihak yang gagal dan krisis, sampai pada teori postmodern yaitu (8) keberagaman, partisipasi publik dengan proses-proses sosial.

Terjadinya konflik internal pada setiap bangsa dibarengi dengan terjadinya berbagai peperangan di belahan dunia, proliferasi senjata nuklir dan senjata perang tetap menjadi ancaman yang menakutkan bagi kehidupan. Hubungan transnasional khususnya kejahatan transnasional telah memaksa kita untuk bekerjasama dengan negara-negara lain, meskipun hal ini juga riskan, sebagaimana pengalaman Indonesia ketika meminta bekerjasama dengan bantuan Australia untuk memberantas teroris, ujung-ujungnya adalah penyadapan oleh Australia.

#### 4. Desain Diplomasi Nano

Uraian di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa desain politik luar negeri tidak dapat diwujudkan dalam ambisi pribadi pemimpin. Tindakan presiden untuk mengamankan negara tidak dapat diwujudkan dalam bentuk pencitraan atau kebijakan yang abstrak. Dalam hal ini diplomasi harus diwujudkan sebagai pemenuhan kebutuhan akan kepentingan dan keamanan internasional yang berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan demi mengamankan. Diplomasi sebagai proses peradaban manusia adalah proses yang tidak terputus. Maka dalam menjalankan diplomasi harus dilihat sebagai suatu proses yang terus berjalan, seperti *chain* atau rantai yang menjalankan roda sepeda, yang berputar terus sehingga sepeda dapat berjalan maju. Demikian pula diplomasi haruslah berkelanjutan (*sustainability*) dan saling bertautan (*conjuncture*). Ibaratnya rantai yang menggerakkan roda sepeda, diplomasi harus terus berputar agar pencapaian kepentingan nasional dan keamanan nasional dapat dicapai secara optimal. Rasionalnya agar diplomasi Indonesia dapat terus berjalan pada jalur yang benar membutuhkan desain yang berkelanjutan dan kebertautan sehingga secara konsisten ikut menyemangati perdamaian dan menjamin keamanan dunia, sebagaimana tertera dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *security for the peoples of the world*.

Desain diplomasi berkelanjutan dan kebertautan sangat memengaruhi cara-cara negara menjalankan diplomasi. Kata “*security for the peoples of the world*” berbasis penjaminan dan penjagaan terhadap peradaban manusia secara global. Pengejaran kepentingan nasional dan keamanan nasional harus memberi implikasi positif terhadap kepentingan dan keamanan internasional, yaitu ditujukan untuk menjaga dan menjamin keamanan bagi kemanusiaan. Diplomasi berkelanjutan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat secara nasional juga untuk mendukung kesejahteraan di dunia dan bukan sekedar permainan politik pencitraan. Diplomat dalam mengabdikan kepada negara ia juga menjadi duta kemanusiaan dan bukan menjadi alat kepentingan penguasa yang tak tampak, Anonimus. Diplomat sangat tidak etis mengatasnamakan negara dan rakyat, tetapi dalam



praktiknya mengedepankan ambisi politik dan kepentingan orang lain. Dalam banyak hal, diplomat terbatas bertindak bahwa kurang nyata melakukan tindakan diplomatik ketika benar-benar terjadi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara dan umat manusia. Fakta yang ironis menjadi bukti yakni adanya perang dimana-mana, terjadinya kekerasan dan konflik berdarah, tetapi para pemegang kuasa tampak tidak memerdulikan. Mereka berpangku tangan atau berpesta pora di bangku-bangku perundingan yang sia-sia sambil mencitrakan diri sebagai presiden atau menteri luar negeri atau diplomat yang memperjuangkan kepentingan nasional.

Sinclair (2012) secara tegas menyebutkan bahwa diplomasi sering “melayani kepentingan kelompok tertentu, yang saya sebut dalam buku ini Anonimus. Kalimat tersebut terkandung maksud bahwa aktor politik nasional (pejabat negara) bertindak atas nama rakyat tetapi sebenarnya pencapaian kepentingan tersebut sangat mungkin ditujukan untuk kepentingan rezim dan membangun bisnis kroni-kroninya. Sering kali diplomasi diselewengkan oleh karena perjanjian mereka dengan aktor bayangan, Anonimus. Dengan demikian sangat mungkin bahwa aktor politik internasional (diplomat) bertindak atas nama representasi negara tetapi dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka lebih banyak memenuhi order (pesanan) dari kepentingan dan misi rezim yang berkuasa. Sedangkan rezim penguasa menjalankan kebijakan dari Anonimus. Dengan diplomasi berkelanjutan dan kebertautan akan memberi peluang rakyat untuk mengontrol dan mengawal diplomasi agar tidak lepas dari jalur diplomasi yang benar.

Uraian di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa desain politik luar negeri tidak dapat diwujudkan dalam ambisi pribadi pemimpin. Tindakan Presiden untuk mengamankan negara tidak dapat diwujudkan dalam bentuk pencitraan atau kebijakan yang abstrak. Dalam hal ini diplomasi harus diwujudkan sebagai pemenuhan kebutuhan akan kepentingan dan keamanan internasional yang berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan demi mengamankan teritorial. Rasionalnya agar diplomasi Indonesia dapat terus berjalan pada jalur yang benar membutuhkan desain yang berkelanjutan dan kebertautan sehingga secara konsisten ikut menyemangati perdamaian dan menjamin keamanan dunia,

sebagaimana tertera dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *security for the peoples of the world*. Dengan diplomasi berkelanjutan dan kebertautan akan memberi peluang rakyat untuk mengontrol dan mengawal diplomasi agar tidak lepas dari jalur diplomasi yang benar.

## **D. Resume dan Evaluasi**

Semenjak aktor non negara memainkan peran yang besar dan dirasakan manfaatnya dalam membangun perekonomian dan kontrol terhadap HAM dan lingkungan hidup, aktor non negara pada akhirnya juga berkontribusibesar dalam persoalan perang dan damai. NGO dan IGO merupakan organisasi nirlaba internasional yang sangat aktif dalam memecahkan persoalan internasional, seperti UNESCO, ILO, dan organisasi ekonomi seperti multinational corporation (MNC) dll. Dari perkembangan tersebut kita dapat menilai bahwa hubungan internasional secara aktif dimainkan oleh aktor negara dan aktor non negara. Persoalannya bagaimana aktor non negara yang radikal dan kriminal? Tunjukkan pendapat Anda secara teoritis dan praktis.

## **E. Pertanyaan Latihan**

1. Menurut Anda mengapa aktor non-negara muncul sebagai aktor yang memengaruhi tata hubungan internasional?
2. Mengapa aktor non-negara memunyai kedudukan yang istimewa dalam politik internasional. Tunjukkan prestasi yang dilakukan oleh aktor non-negara.
3. Apakah perubahan dan pergeseran paradigma aktor tersebut secara keseluruhan memengaruhi pola hubungan antar negara?
4. Seberapa jauh aktor non negara dan aktor negara secara sinergis bekerja untuk mencapai perdamaian internasional.
5. Jelaskan mengenai pergeseran konsep *power* dalam hubungan internasional pascaperang dingin dan lahirnya sistem multipolar!.



## BAB IV.

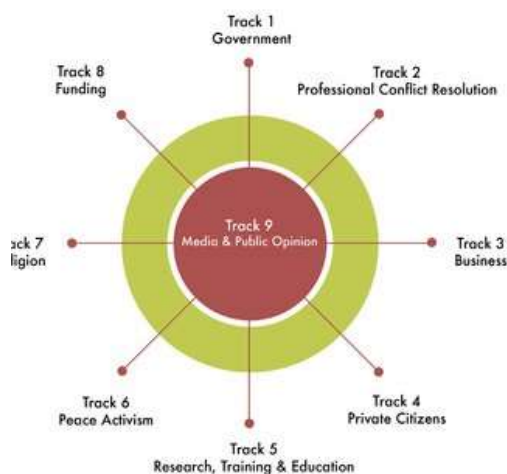
### **MIGRASI PRAKTIK *NANO POWER DIPLOMACY* : Dari Diplomasi Platform Off-line ke Diplomasi Platform On-line**

Diplomasi sebagai wahana untuk mencapai kepentingan nasional yang dilaksanakan baik oleh *state actors* maupun *nonstate actors* harus mengedepankan prinsip damai. Diplomasi harus mampu memberi kebebasan kepada setiap aktor untuk bergerak yang berpegang pada prinsip persaudaraan, menggunakan standar moral dan nilai-nilai universal sebagai landasan dan pedoman dalam menciptakan hubungan internasional. Norma tersebut secara tertulis dituangkan dalam norma internasional yakni Konvensi, Traktat, Perjanjian, Hukum Internasional, dll. Bagi *state actors*, pelaksanaan diplomasi dilakukan oleh para diplomat sebagaimana dimuat dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 3. Kegiatan itu meliputi *Representing* (yakni mewakili), yang kedua adalah *Negotiating* (berunding), ketiga *Protecting* (melindungi), keempat *Promoting* (memperkenalkan) dan terakhir adalah *Reporting* (melaporkan) (Nasution, 2012). Dalam menjalankan tugas diplomasi, diplomat difasilitasi dengan berbagai kelengkapan seperti (1) Tempat kegiatan seperti gedung, alat mobilitas serta kelengkapan organisasi, (2). Sumber daya manusi, dengan kompetensi yang memadai seperti kecakapan menguasai persoalan, teliti, jujur, tepat waktu, serta kecakapan dalam hal kekayaan intelektual, baik kecakapan berbahasa asing, menguasai bahasa dan budaya sendiri secara baik, melek teknologi dan secara spiritual sehat; (3). Sumber biaya operasional yang memadai serta 4). panduan operasional, meliputi prinsip, prosedur, strategi dan teknik diplomasi. Setiap negara memunyai gaya berdiplomasi yang beragam. Bagi Amerika Serikat,

menurut Hillary Clinton adalah gaya diplomasi *smart power diplomacy* yakni menggabungkan antara penggunaan *soft power diplomacy* dan *hard power diplomacy*. Secara historis AS telah menjalankan *transformation diplomacy* yakni diplomasi berbasis demokrasi, sebagai kelanjutan dari gagasan “*making the world safe for democracy*,” oleh Sir Woodrow Wilson tahun 1919. Demokrasi adalah sarana yang paling realistis untuk mencapai perwujudan hubungan internasional yang adil, sejahtera dan keamanan bersama. Bagi Indonesia, diplomasi terkini sebagai diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dengan *Total Diplomacy*, berbasis pada perwujudan NKRI yang solid, keamanan yang memadai, pelaksanaan demokrasi dan kemakmuran nasional yang optimal serta menggerakkan seluruh *stakeholders* (aktor negara dan non negara) dalam upaya mencapai tujuan nasional. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian meliputi :

1. Perdamaian dan Keamanan Dunia
2. Pembangunan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup
3. Kerjasama internasional
4. Penanganan krisis dan bencana Global.
5. Reformasi Pemerintahan Global

Selanjutnya, bagi *non-state actors*, khususnya kegiatan warga negara, termaktub dalam *multitrack diplomacy* pada *track* ke 4, yaitu *private* atau *citizen diplomacy* (lihat gambar).



Dengan demikian, kegiatan diplomasi oleh warga negara (unsur nano), berbasis *soft power diplomacy*, diplomasi lunak (halus), atau kegiatan yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karenanya yang dikedepankan dalam diplomasi warga ini adalah *human brotherhood, freedom* dan *equity*. Secara teoritik, kegiatan diplomasi oleh warga negara (*private citizen*) ini lebih mementingkan upaya membangun solidaritas sosial internasional, yang melibatkan warga negara berdasar prinsip persaudaraan sosial, kesejahteraan batin, keadilan antar budaya serta membangun kebersamaan di tengah hidup dalam perbedaan. Oleh sebab itu, diplomasi warga atau *netizen diplomacy*, yang dalam penelitian ini kami sebut sebagai diplomasi nano, pada dasarnya berbicara tentang instrumen yang digunakan untuk melakukan diplomasi warga lebih dominan dengan menggunakan unsur edukasi, seni-budaya, kuliner dan hasil kerajinan bangsa Indonesia. Instrumen tersebut tujuannya sebagai sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada public asing. Tujuan yang lebih luas lagi adalah menciptakan perdamaian dan solidaritas internasional, dengan cara saling menghormati dan saling menghargai perbedaan budaya.

### **A. Nano Power Diplomacy dalam Konteks Diplomasi Budaya**

Berbicara tentang praktik diplomasi, aktor nano disebut sebagai bentuk diplomasi lunak (*soft power*), yang jelas berbeda dengan *hard power*. *Soft power* adalah kekuatan yang memunyai kemampuan menyihir orang melalui persuasi. Orang asing akan terkagum-kagum dengan nilai hidup bangsa lain, mengagumi dan menghormati dengan sukarela, jauh dari paksaan dan ancaman serta bentuk kekerasan lainnya. Secara historis, konsep *soft power* tergolong diskursus yang muncul sekitar setelah perang dingin usai. Pada waktu yang sama, peranan aktor non-negara mulai diperhitungkan dalam kompleksitas persoalan hubungan internasional. Pada saat yang sama, sebagian para akademisi HI mulai melihat bahwa pendekatan tradisional yang mementingkan *state actors* dianggap stagnan. Sementara kekuatan non state actors terutama yang berskala besar semakin menunjukkan kekuatannya.

Dalam era milenial terkini, kita juga melihat bahwa peran aktor non negara, termasuk aktor non-negara yang paling terkecil yaitu aktor nano, mulai dibicarakan setelah melihat kenyataan bahwa kontribusi teknologi informasi dan komunikasi semakin membawa dunia ke arah kehidupan virtual. Studi tentang *soft power* sesungguhnya sejak lama ditulis oleh Morgenthau (1948) yang menerbitkan karyanya *Politics Among Nations*. Buku tersebut dikenal sebagai madzab realis, sehingga ia masih mengunggulkan *state* sebagai aktor utama dan *power* sebagai pembahasan sentral. Namun demikian saya melihat beberapa hal dalam buku tersebut sehubungan dengan *soft power*. Dalam pandangannya, *soft power* adalah kekuatan budaya (*cultural power*) dan prestise. Menurutnya, kekuatan budaya dan prestise dari suatu negara menjadi bagian penting dari kekuatan (*power*) yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional. Ia menegaskan bahwa efektivitas kekuatan budaya dan prestise mendukung kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Jadi, *soft power* mendukung *hard power*. Sebagai kekuatan pendukung *hard power*, *soft power* bersumber dari *deterrence effect*, yakni suatu kekuatan yang membuat musuh kagum dan menanamkan rasa hormat bahkan rasa takut. Meskipun Morgenthau telah membahas peran kekuatan budaya dan prestise, namun ia belum menyebut sebagai *soft power*. Buku Morgenthau *Politics Among Nations* merupakan representasi dari studi hubungan internasional yang menekankan aktor negara sebagai panglima. Negara adalah pemain tunggal dalam arena global. Maka tidak heran jika Morgenthau merasa pesimistis untuk menempatkan kekuatan lunak (*soft power*) yang memunyai pengaruh cukup efektif dalam upaya negara mencapai kepentingan nasional. Walau demikian ia tetap yakin bahwa *soft power* adalah pendukung *hard power* yang potensial. Maka tidak mengherankan jika Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri AS memilih dua kekuatan, yaitu *hard power* dan sekaligus *soft power* untuk menjalankan politik luar negeri AS. Kebijakan menjalankan dua kekuatan secara simultan itulah yang disebut Hillary Clinton sebagai *smart power diplomacy*.

Dalam konteks *power relations*, Morgenthau juga menyebut *soft power* sebagai politik prestise dan politik budaya. Hanya saja bentuk

politik prestise itu belum secara eksplisit disebut sebagai *soft power*. Hal ini disebabkan dalam politik prestise dalam beberapa hal masih menggunakan *show of force*, yakni suatu pameran kekuatan sebagai tanda peringatan untuk memengaruhi pihak lain.

## **B. *Nano Power Diplomasi* dalam Konteks Diplomasi Budaya**

Diplomasi budaya sering disebut sebagai suatu praktik diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara maupun warga negara. Pada prinsipnya diplomasi budaya adalah upaya memengaruhi publik asing melalui pengenalan budaya sendiri kepada warga negara asing. Sejak lama bahwa para pelancong, pedagang, misionaris, mahasiswa dan seniman menampilkan dirinya sebagai “diplomat atau duta budaya” karena mereka mengenalkan tentang potensi dan ragam budaya Indonesia kepada penduduk asing. Dalam interaksi tersebut, kita melihat bahwa terjadi pertukaran antar budaya yang sangat intens, baik dalam bidang kesenian, musik, olah raga, pendidikan dan bisnis. Misalnya, penetapan rute perdagangan reguler memungkinkan pertukaran informasi dan hadiah budaya dan ekspresi yang sering antara pedagang dan perwakilan pemerintah. Upaya pertukaran budaya dan komunikasi yang disengaja seperti itu dapat diidentifikasi sebagai contoh awal diplomasi budaya. Dalam pertemuan dan interaksi mereka sepanjang sejarah telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya hidup saling berbagi. Para mahasiswa dan dosen bekerja sama untuk penelitian akademik, kaum agamawan memperkenalkan ajaran agamanya, para seniman melakukan pameran seni, pentas pertunjukan dan diskusi yang intensif. Akhirnya mereka saling mengenal satu dengan yang lain yang menumbuhkan saling pengertian antar bangsa.

Uraian di atas menyimpulkan bahwa hubungan antar budaya dan hubungan antar penduduk yang berbeda-beda dalam konteks hubungan internasional dapat disebut sebagai diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan serangkaian kegiatan oleh warga negara melalui dialog sosial, seni dan budaya sebagai wahana bertukar



pikiran, identitas, berbagi tradisi, norma dan nilai masing-masing, guna membangun solidaritas kemanusiaan, meningkatkan kolaborasi seni, kerjasama sosial dan ekonomi, serta memperkuat relasi kemanusiaan di berbagai sektor. Diplomasi budaya adalah bentuk diplomasi aktor non-negara yang berbasis masyarakat sipil, organisasi swasta serta sektor publik lainnya. Para akademisi hubungan internasional dan praktisi yang bekerja pada arena hubungan internasional, mulai melakukan kajian dan refleksi yang dinamis, inovatif sehingga banyak karya diplomasi budaya yang beredar luas.

Dalam dunia yang semakin mengglobal dan saling bergantung, diplomasi budaya sangat penting untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Hal ini didukung oleh proliferasi teknologi komunikasi massa yang massif, yang mampu menjangkau orang sampai di pelosok desa. Semua orang memiliki akses besar untuk saling bertegur sapa satu sama lain daripada era sebelumnya. Setiap orang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik dan resolusi sengketa global. Akhirnya, diplomasi budaya memiliki kemampuan untuk menyebarkan gagasan, ide-ide, yang mampu memengaruhi masyarakat internasional baik secara individu, komunitas, etnik dan bangsa. Diplomasi budaya akhirnya juga mampu mempercepat terwujudnya 5 prinsip di bawah ini :

1. Penghormatan & Pengakuan Keanekaragaman Budaya & Warisan
2. Dialog Antarbudaya Global
3. Keadilan, Kesetaraan & Saling Ketergantungan
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional
5. Perdamaian & Stabilitas Global.

### ***C. Nano Power Diplomacy dalam praktek Diplomasi Off-line***

Peran *nano power* dalam diplomasi terkini dapat diterjemahkan melalui berbagai cara. Yang pertama, berkaitan erat dengan pelaku, apakah pelaku tunggal, yakni individu atau pelaku merupakan rombongan atau berupa tim. Keterlibatan warga negara dalam diplomasi, *citizen diplomacy*, sudah dipelajari sejak perang dunia kedua

dalam upaya berkontribusi bagi negaranya. James Marshall (1949) telah membuktikan bahwa sejak tahun 1940 warga negara AS ikut serta dalam menentukan kebijakan luar negeri. Fenomena tersebut terus berkembang. Warga AS telah berpartisipasi dalam urusan kebijakan luar negeri baik secara sukarela maupun diundang dan difasilitasi oleh Pemerintah AS. Sinergitas antara akademisi, warga negara biasa, lembaga pemerintah dan lembaga swasta merupakan potensi bagi terbentuknya diplomasi warga. Contohnya dalam berbagai konferensi internasional, pemerintah tidak saja hadir dengan *official team*, tetapi juga melibatkan organisasi nirlaba (LSM) dalam sidang-sidang internasional. Hal itu seperti dilakukan oleh pemerintah AS dalam menyusun pasal-pasal berkaitan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (UN Charter) juga melibatkan organisasi kemasyarakatan. Demikian pula dengan persoalan internasional lainnya juga melibatkan warga negara. Dalam persoalan perempuan, pemerintah juga turut melibatkan organisasi non pemerintah dalam menyelesaikan masalah, mulai dari negosiasi maupun juga turut dalam menyelesaikan resolusi konflik perempuan. Pada akhirnya kita dapat melihat peran nano power dalam diplomasi terkini dapat diterjemahkan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah berkaitan erat dengan pelaku. Mereka bisa merupakan pelaku tunggal (individual) atau pelaku rombongan (tim). Dalam kesempatan ini, akan kami tampilkan Nano Power Diplomacy yang dipraktikkan oleh beberapa praktisi dan akademisi di kancah internasional.

### **1. Wayang diplomasi Di Eropa Timur**

Pada awalnya bermula dari pengembangan kompetensi Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang terdiri atas dua bidang utama yaitu bidang diplomasi dan bidang kerjasama internasional. Sesuai dengan acuan Renstra, penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada tiga pilar utama yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yakni ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai kepentingan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mengacu pada tujuan pendidikan, pengabdian

masyarakat dan riset pendidikan tinggi, yaitu mengedepankan kualitas dan produktivitas, efisien, berdaya saing serta memiliki reputasi yang tinggi. Melalui cara itu, perguruan tinggi mampu meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*).

Pada umumnya, praktik tri dharma perguruan tinggi intinya adalah mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang *up to date*. Perguruan tinggi mampu memberikan pembimbingan kepada segenap sivitas akademika, terutama warga UNS untuk mencapai visi yang ditetapkan, serta mampu memberikan kontribusi pemikiran yang nyata kepada masyarakat lokal, nasional dan global. Demi mencapai kepentingan, prodi HI membuat program internasional yang disebut sebagai wayang diplomasi. Wayang diplomasi merupakan bagian dari diplomasi publik melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat internasional, dengan tema “Internasionalisasi Wayang Kulit dan Batik di Eropa Timur, pada tahun 2015. Program internasional tersebut disusun sejalan dengan berbagai mata kuliah dalam Program Studi HI, antara lain, Teori Diplomasi, Praktik Diplomasi, Komunikasi Internasional dan Diplomasi Publik, Kerjasama Internasional, dan lain-lain. Langkah dilalui melalui penyusunan program kerja kemudian menjalin kerjasama dengan sejumlah kedutaan, antara lain kedutaan besar RI di Bulgaria. Diplomasi publik ini sejalan dengan arus politik luar negeri RI, yaitu diplomasi lunak (*soft power diplomacy*). Inti program diplomasi lunak adalah untuk mempromosikan Indonesia di mata internasional. Topik diangkat yakni “Ekonomi Pancasila,” “Seni dan budaya bangsa Indonesia,”. Kegiatan diplomasi publik dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan yakni melalui wayang kulit, kuliner, dan batik. Program wayang Indonesia dan batik merupakan kelanjutan program sosialisasi wayang dan batik untuk dunia dan sebagai bentuk kontinuitas wayang dan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda (UNESCO). Target yang ingin dicapai dalam program diplomasi wayang tersebut adalah membangun citra positif bangsa dan negara Indonesia di mata internasional melalui seni budaya. Selain itu, program diplomasi wayang diharapkan UNS memperoleh jaringan dunia, baik sebagai kolaborasi antar warga, kerjasama riset, *lecturer exchange* bagi dosen dan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat dalam berbagai bidang.

## 2. Program Wayang Diplomasi di Eropa Timur

Perlu diketahui bahwa untuk menyiapkan program diplomasi nano, aktor individu membutuhkan berbagai kesiapan yang matang. Persiapan tersebut meliputi berbagai keperluan administratif berupa dokumen perjalanan seperti paspor, visa, surat tugas baik dari institusi sponsor serta surat tugas dari institusi pelaku bekerja. Persiapan tersebut membutuhkan waktu dan pikiran sebab harus menyiapkan proposal yang matang dan kuat, mulai dari tujuan, manfaat bagi institusi maupun bagi negara dan bangsa Indonesia, serta hasil yang ingin dicapai. Kedua, mempersiapkan pendanaan untuk segala kebutuhan termasuk kesiapan mata uang asing di negara dituju. Koordinasi juga harus dilakukan dengan baik ketika telah sampai di negara dituju terutama dengan kedutaan sehingga pelaksanaan diplomasi dapat berjalan dengan baik. Pada praktik yang kami lakukan, dimulai dengan persiapan materi. Tentang budaya misalnya, hal yang dilakukan adalah menyiapkan materi dalam bentuk power point, kemudian film atau video pendek yang berisi tentang seni dan budaya Indonesia. Contohnya berisi tentang proses pembuatan wayang, batik, serta tata cara pengolahan kuliner khas Indonesia. Dalam penyiapan tersebut, aktor diplomasi nano harus menyempurnakannya dengan matang karena hal itu modal penting untuk disampaikan kepada publik asing. Kualitas materi perlu kontekstual dengan jaman, menyesuaikan dengan bahasa maupun budaya setempat. Pendanaan untuk melakukan *nano power diplomacy* tersebut juga besar karena untuk penyediaan bahan cukup banyak seperti bahan untuk membatik, dan tokoh-tokoh wayang. Tokoh wayang sendiri jumlahnya ada lebih dari 40. Kala itu dana diperkirakan perlu Rp. 35 juta. Kami bersyukur bahwa pada 2016 Dubes RI di Rusia, Wahid Supriyadi, telah membeli wayang kami seharga \$ 3.500, sehingga dapat menjadi pengganti untuk kebutuhan bahan dalam praktik nano diplomasi. Berikut gambaran rinci perihal kebutuhan dana untuk melakukan nano power diplomacy kala itu yakni pengadaan tokoh wayang kulit dan *uba rampe* (kayon, keprak, geber, wayang besar dan kecil) sekitar Rp 35 juta. Sedangkan untuk dukungan rekaman gamelan dibutuhkan dana Rp 8 juta, untuk pembuatan batik lukis sekitar Rp. 5 juta termasuk untuk peralatan membatik seperti kompor, canting, malam dan zat pewarna).

Setelah persiapan selesai baik paspor, visa, materi serta peralatan yang akan digunakan untuk diplomasi, maka perlu kami sampaikan tentang pelaksanaan kegiatan, yang terbagi dalam tiga bagian. *Pertama*, jalur perjalanan Solo-Sofia-Solo. *Kedua*, mengenai kegiatan wayang diplomasi, batik dan *visiting lecturer*. *Ketiga*, pasca iplomasi budaya seperti laporan dan diseminasi hasil kegiatan. Perjalanan ke Sofia Bulgaria memperoleh paspor dinas tetapi tidak dibutuhkan visa karena Bulgaria termasuk bebas visa. Saya berangkat dari Solo 13 oktober 2015 dengan Lion Air, transit di Doha Qatar, dan tanggal 14 pagi sampai di ibukota Bulgaria Sofia. Saya dijemput oleh KBRI dengan pelayanan yang memuaskan. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya menerima surat tugas dan uang saku dari Direktur Diplomasi Publik Kemendikbud sebesar Rp. 26 Juta untuk dinas diplomasi budaya selama 2 bulan. Selama di Bulgaria, saya difasilitasi oleh KBRI, atas kebaikan Duta Besar Bunyan Saptono, MA, yang menyediakan kamar tempat tinggal, jatah makan sehari tiga sekali dari Senin-Jumat. Untuk sarapan disediakan roti, keju, telur, susu. Untuk makan siang Dubes sering mengajak untuk makan siang di restoran terbaik di Sofia. Sedangkan untuk keperluan makan pada malam hari, serta makan Hari Sabtu dan Minggu menggunakan uang harian sebesar 500 Leva (setara Rp. 4 juta rupiah) yang diberikan oleh Duta Besar. Sekali makan di Sofia 10 leva (setara dengan Rp. 75.000,-). Saya juga memperoleh uang tiket transport lokal berlangganan untuk satu bulan yakni 52 leva (setara Rp.40.000).

Selama berada di Eropa Timur, di Bulgaria, Rumania dan Moldova, saya melakukan praktik diplomasi Nano, sebagai berikut :

- a. 1). Dalam Pendidikan, saya menjalankan tugas sebagai *guest lecturer*, mengisi seminar dan workshop di beberapa perguruan tinggi yakni:
  - 1) International seminar di Universitas Ruse, di Ruse, Bulgaria
  - 2) International seminar di Universitas Sofia, di Sofia, Bulgaria

- 3) Workshop Indonesian Traditional Theater in Academy National for Theater and Art-Film (NATFIZ), Sofia Bulgaria
  - 4) Workshop Indonesian Traditional Theater in New Bulgarian University (NBU), di Sofia, Bulgaria
  - 5) Seminar in Opening Ceremony for Honorary Consulary of Republic Indonesia in Varna, Varna City, Bulgaria.
  - 6) Guest Lectureur, in Academy of Study Economy (ASE), Bucharest, Rumania.
  - 7) International seminar using Wayang Kulit with 7 Countries, in Teatrul Elisabeta, Bucharest, Romania (bukti-bukti lihat foto terlampir).
- b. Dalam bidang Pengabdian Masyarakat:
- Adapun kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, dilakukan di beberapa tempat, yakni:
- 1) Sekolah No. 8 di Sofia Bulgaria.
  - 2) Sekolah di Veliko Tornovo, Bulgaria.
  - 3) Sosialisasi nilai-nilai Pancasila menggunakan Wayang Kulit, di Varna, di Sofia, Chisinau dan Bucharest.
  - 4) Sosialisasi pembuatan Batik di Varna (Lihat foto).
- c. Foto-foto kegiatan *Nano Power Diplomacy* di Bulgaria dan Romania.



**Gambar 2 :** Nano Power Diplomacy, *Program Pengabdian pada Masyarakat di Sekolah Dasar di Kota Velico Tornovo, Bulgaria.*



**Gambar 3 :** *Workshop wayang di NATFIZ, Sofia Bulgaria, dengan Topik, “How to be a Dalang.” Para mahasiswa dan masyarakat Bulgaria belajar bagaimana memainkan wayang kulit.*



**Gambar 5 :** *Pementasan Wayang Kulit oleh penulis di New Bulgarian University (NBU), Sofia, Bulgaria. Sebelum pementasan dilakukan workshop wayang dengan topik. “How playing a Wayang Kulit performance.”*



**Gambar 6 :** *Pementasan Wayang Kulit oleh Prof. Andrik Purwasito di New Bulgarian University (NBU), Sofia, Bulgaria. Sebelum pementasan dilakukan workshop wayang dengan topik. “How playing a Wayang Kulit performance.”*



**Gambar 7 :** *Workshop wayang dengan topik. “How playing a Wayang Kulit performance.”sebelum Pementasan Wayang Kulit oleh Prof. Andrik Purwasito di New Bulgarian University (NBU), Sofia, Bulgaria.*





**Gambar 8:** *Workshop wayang dengan topik. "How playing a Wayang Kulit performance." sebelum Pementasan Wayang Kulit oleh Prof. Andriek Purwasito di New Bulgarian University (NBU), Sofia, Bulgaria.*



**Gambar 9:** *Pementasan wayang kulit di KBRI, Sofia Bulgaria bersama Duta Besar dan istri serta seluruh Diplomat dan Pegawai KBRI serta Indonesianis*



**Gambar 10 :** *Visiting Lecturer di ASE, Academy de Study Economy di Bucharest, Romania dengan Topik “Economy Pancasila and Wayang Kulit as Indonesian cultural Production.*



**Gambar 11 :** *Bersama murid-murid di Sekolah Dasar NO. 6 Sofia, Bulgaria, mengenal Indonesia melalui wayang kulit.*



**Gambar 12 :** *Pembukaan Console Honorer Indonesia di Varna, Bulgaria. Pendirian Konsulat Honorer merupakan contoh dari Citizen Diplomacy, karena kegiatan individual (warga bulgaria) mendirikan konsulat untuk membantu warga Bulgaria membeli produk kuliner dan seni dari Indonesia.*



**Gambar 13 :** *Pementasan Wayang Diplomacy di depan warga Bucharest Romania, yang terdiri atas Kedutaan Asing dari 8 Negara, termasuk Jerman, AS, Inggris, Prancis, Italia, Libanon, dll.*

## Resume dan Implikasi

Program pendidikan, pengabdian pada masyarakat di Eropa Timur, di Bulgaria, Moldova, dan Rumania, merupakan satu program promosi Indonesia yang cukup efektif dalam memperkenalkan seni dan budaya Indonesia termasuk ideologi Pancasila melalui metode hiburan yang diselingi dengan dialog interaktif. Inilah peran dan kontribusi dari Nano Power Diplomacy untuk mendukung program diplomasi publik di Kementerian Luar negeri RI dan juga implementasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Diplomasi Publik. Dengan durasi 2 bulan tersebut, proses promosi, persuasi dan *transfer of knowledge* berjalan secara wajar dan lebih memberikan kesan positif orang asing terhadap Republik Indonesia.

Dengan program *Nano Power Diplomacy*, sebagian besar publik asing, yakni pelajar dan mahasiswa, ke depan mempunyai prospektif untuk menjalin dan hubungan kerjasama baik antar warga negara dengan warga negara maupun warga negara dengan Pemerintah RI. Implikasi dari program *Nano Power Diplomacy* tersebut, universitas di Indonesia terbuka untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang dengan ketiga negara tersebut, yakni :

1. Universitas of Ruse (Public), Ruse City, Bulgaria
2. Universitas of Plovdiv(Public), Plovdiv City, Bulgaria
3. Universitas of Sofia (Public) , Sofia City, Bulgaria
4. New Bulgarian University (NBU, Privat), Sofia City, Bulgarian
5. NATFIZ, Academy National of Theater and Film Art
6. University of Turkey, Edirne City, Turkey
7. Free University of Modolva, (U.L.I.M) Chisinau City, Modolva
8. ASE (Academy of Study Economy) Privat , Bucharest, Rumania
9. Inter ASEAN-EUROPEAN Study, (Privat), Bucharest, Rumania

Dalam berbagai kegiatan berimplikasi hubungan antar-bangsa semakin dekat dan kuat, yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan kerjasama dan kolaborasi di berbagai dialog, pertukaran mahasiswa, dosen, kerjasama dan kolaborasi penelitian. Dengan cara ini akan memungkinkan kerjasama lebih baik antar bangsa Indonesia dengan rakyat di Eropa Timur khususnya, dan masyarakat global pada umumnya.

### 3. Program Wayang Diplomasi di Federasi Rusia dan Jepang

Tahun 2016 diplomasi nano yang dilakukan oleh Andrik Purwasito (peneliti), Kaprodi Hubungan Internasional, FISIP UNS, adalah misi diplomasi budaya di Federasi Rusia dan di Jepang. Di Rusia, yang dilakukan adalah memromosikan keberagaman budaya Indonesia dengan menggelar sebuah acara bekerjasama dengan Organisasi Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Moskow, PERMIRA. Acara itu yakni festival seni budaya Indonesia yang di pusatkan di Universitas Persahabatan Rusia (RUDN) di kota Moskow. Dalam kesempatan tersebut, selain memainkan wayang yang dilakukan adalah juga memberi pelajaran menabuh gamelan kepada mahasiswa dan hadirin yang menonton pameran yang diadakan bulan Mei 2016. Dalam kesempatan itu, kami dipercaya menjadi host pada acara puncak di Hall RUDN, yang dihadiri oleh ratusan pengunjung dari berbagai negara. Hadir pula Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus, Wahid Supriyadi, para pejabat KBRI dan para Diplomat RI yang bekerja di Moscow, serta hadir Gubernur Kalimantan Timur dan anggota DPRD. Di Rusia, selama menjalankan tugas diplomasi budaya di Moscow, selain melatih warga juga Dharma wanita KBRI dalam menabuh gamelan. Hasil latihan ditampilkan mengiringi pagelaran wayang kulit di Hermitage Garden Kota Moscow, pada 27 Mei 2016.

Perjalanan diplomasi nano kemudian dilanjutkan ke Kurume University di Fukuoka Jepang untuk misi diplomasi budaya Batik dan *visiting lecturer* pada bulan Juli 2016. Aktivitas Nano Power Diplomacy di Jepang dapat dijelaskan melalui dalam tiga tahapan. Tahap *pertama*, persiapan dan perjalanan jalur perjalanan Solo-Yogyakarta-Fukuoka-Yogyakarta-Solo. *Kedua*, menjalankan aktivitas dan kegiatan dari tanggal 12-18 Juli 2017. Tahap ketiga, kegiatan *visiting lecturer* di fakultas hukum Universitas Kurume Fukuoka, Jepang dengan tema *CONTEMPORARY ISLAM INDONESIA*. Diikuti kurang lebih 60 mahasiswa dari pukul 10-12.00 dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) tentang Islam di Indonesia. Kegiatan nano diplomacy tersebut telah ditinjaklanjuti dengan kunjungan mahasiswa Jepang ke UNS dengan melakukan kegiatan budaya Jepang, dengan tema KIMONO JEPANG di FISIP UNS tanggal 28-29 September

2017. Pada tahun 2020 dua dosen UNS (Prof. Dr. Mahendra dan Dr. Zubair) diberangkatkan ke Jepang untuk *visiting lecturer*. Kegiatan terakhir di Jepang adalah pementasan wayang kulit, bertempat di Great Hall City of Kurume, yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat. Pagelaran wayang ini merupakan kegiatan nano diplomacy yang kedua, yang mana setahun sebelumnya juga dilakukan *visiting lecture* dan diplomasi nano tentang tema “Belajar membuat” (2016). Pagelaran wayang kulit dengan cerita Arjunatama (lihat foto) tersebut berlangsung pada tahun 2017.

Pada bulan Agustus 2016, penulis kembali ke Moscow untuk melanjutkan diplomasi budaya untuk mengisi dua acara. *Pertama* adalah Indonesian Expo di Moscow 20-21 Agustus 2016 dan acara ASEAN Day pada tanggal 26 Agustus 2016 di Museum Nasional Darwin di Moscow. Dalam persiapannya, penulis mengajari penduduk Moskow menabuh gamelan, belajar *nembang* dan menari. Hasilnya adalah pagelaran yang digelar di Taman di tengah Moscow, Hermitage Garden, Museum Darwin.



**Gambar 14:** Kegiatan *visiting lecturer* dengan topik *Contemporary Islam in Indonesia* di Fakultas Hukum, Universitas Kurume, Fukuoka, Jepang, 2017.



**Gambar 15 :** *Pementasan Wayang Kulit dengan cerita Arjuna Satriautama, di The Great Hall of Kurume City, Kurume, Fukuoka, Jepang, 2017.*



**Gambar 16 :** *Para penonton Wayang diplomasi yang dimainkan oleh Prof. Andrik Purwasito selama 30 menit telah memukau penonton warga Kurume Jepang.*



**Gambar 17 :** *Para penonton Wayang diplomasi di Kurume Jepang, 2017.*



**Gambar 18 :** *Para penonton Wayang diplomasi di Kurume Jepang, 2017.*

Foto-Foto Kegiatan di Moscow, Federasi Rusia tahun 2016.





**Gambar 19:** *Prof. Andrik sedang melatih warga Moscow menabuh Gamelan di KBRI, Moscow, Federasi Rusia. Latihan tersebut akan dipentaskan dalam pagelaran wayang diplomasi di Hermitage Garden Moscow*



**Gambar 20:** *Prof. Andrik sedang mengajari mahasiswa Indonesia yang melanjutkan kuliah di Moscow, sebagai persiapan untuk pagelaran seni-budaya Indonesia di Universitas Persahabatan Moscow (RUDN).*



**Gambar 21:** *Prof Andrik tengah melakukan pagelaran di Museum Darwin di Moscow menampilkan gagrak lancar Sinanebah.*



## BAB IV

### EPILOG

Kesimpulan riset ini adalah menjawab tiga pertanyaan yang dirumuskan di muka yaitu pertama bahwa pandemi covid-19 telah berdampak pada tata hubungan internasional dan tata kelola hubungan internasional, khususnya dalam praktik diplomasi dari *platform on-site* ke *platform on-line*. Fakta menunjukkan bahwa *state actors* melakukan migrasi tersebut secara serempak dan radikal. Seluruh kegiatan diplomasi dan hubungan internasional dilakukan secara daring. Sedangkan pada *nonstate actors*, *netizen* juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan publik asing serta membuat konten media yang sangat beragam. Kedua, terjadinya pergeseran paradigma dalam hubungan internasional, yakni terjadinya *focus of international* dalam studi hubungan internasional dari basis *state actors* ke basis *nonstate actors*, yang dikenal dengan *multitrack diplomacy*. Jalur itu juga disebut dengan sembilan jalur diplomasi, yang terdiri atas satu jalur *state actors* dan delapan jalur lainnya berupa jalur *non-state actors*. Dalam kondisi tersebut, *nano power diplomacy* merupakan riset yang menempatkan individu sebagai unit terkecil dari diplomasi, sangat relevan untuk diangkat sebagai *subject matter* baru dalam studi hubungan internasional. Ketiga, bagaimana praktik diplomasi nano dalam hubungan internasional masih akan dilanjutkan pada tahun kedua. Dengan demikian belum dapat disimpulkan secara tegas. Hanya saja, praktik diplomasi *netizen* secara *off-line* dapat disimpulkan bahwa *netizen* bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan jaringan di luar negeri menunjukkan peningkatan publikasi tentang kegiatan diplomasi nano sehingga diharapkan menginspirasi *netizen* lainnya untuk menjalankan diplomasi publik secara luas.

## Nano Power Diplomacy

Saran bagi pemerintah RI adalah dukungan akses informasi bagi para *netizen* dan dukungan dana agar semakin banyak *netizen* yang dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi budaya di negara asing. Terutama peran KBRI yang sangat strategis sebagai basis untuk melakukan kegiatan dan dukungan serta fasilitasi bagi kaum *netizen* untuk memerankan diplomasi nano secara efektif dan signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1297175>
- Ashton, Jenifer; & Toland, S. (2021). *The New Normal: a Roadmap to Resilience in the Pandemic Era*. Harper Collins.
- Burgess, Heidi; Burgess, G. M. (2016). *Louise Diamond & John McDonald's Multi-Track Diplomacy*. <https://www.beyondintractability.org/moos/multi-track-diplomacy>
- Butterfield, J. (2003). *Collins English dictionary : complete and unabridged* (6th ed.). Glasgow : HarperCollins.
- Carlsnaes, Walter; Risse, Thomas; Simmons, B. A. (2013). *Handbook of international relations* (2nd ed.). Sage Publications.
- Christer Jönsson, & Hall, M. (2005). *The Essence of Diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Cohen, Y. (1996). *Media Diplomacy: The Foreign Office in the Mass Communications Age*. Frank Cass and Company Limited.
- Diamond, Louise ; McDonald, J. (1996). *Multi-Track Diplomacy- A Systems Approach to Peace*. Kumarian Press.
- Ferguson, N. (2015). *Kissinger*. Pinguin Press.
- Hatta, M. (1946). *Mendayung Antara Dua Karang*. Kementrian Penerangan RI.
- Heritage, A. (2011). *Dictionary of the English Language* (5th ed.). Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
- Heywood, A. (2017). *Politik Global*. Pustaka Pelajar.
- Holsti, K. J. (1972). *International Politics: A Framework for Analysis*. Prentice Hall.
- House, R. (2000). *Random House Webster's College Dictionary*. Random house Publishing.

- Junior, J. S. N. (2009). *Soft Power: The Means To Success In World Politics* (revised). PublicAffairs.
- Kerr, Pauline; & Wisemen, G. (2018). *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices* (2nd ed.). Oxford University.
- Lishingman, V. (2000). Henry Kissinger's Contribution to the Conception of International Relations Legitimacy, Concensus and Order: the Foreign Policy of Moderation. *Glendon Journal of International Studies*, 1, 14–22. <https://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/view/35137/31882>
- Makow, H. (2015). *Illuminati: Dunia dalam Genggaman Perkumpulan Setan*. Ufuk Publishing.
- Marshall, J. (1949). International Affairs: Citizen Diplomacy. *American Political Science Review*, 43(01), 83–90. <https://doi.org/10.1097/00002820-198706000-00006>
- Morgenthau, H. J. (2005). *Politics Among Nations: The Struggle for Power*. McGraw-Hill.
- Nasution, N. (2012). *Dari Aktivis Menjadi Diplomat*. Mizan.
- Pamment, J. (2016). *British Public Diplomacy and Soft Power Diplomatic Influence and the Digital Revolution Studies in Diplomacy and International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Purwasito, A. (2011). *Pengantar Studi Politik*. UNS Press.
- Purwasito, A. (2015). *Komunikasi Multikultural*. Pustaka Pelajar.
- Purwasito, A. (2013). Survival, Self-sufficiency, and Peacefull Coexistence. *Proceeding Asean and International Relations*, 137–139.
- Rosenau, J. N. (1990). *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. Princenton.
- S.L, R. (1991). *Diplomasi*. Rajawali Press.
- Sandre, A. (2015). *DIGITAL DIPLOMACY: Conversations on Innovation in Foreign*. The Rowman & Littlefield Publishing Group.

- Shaw, M. (2012). Tentang Dialektika Perang dan Negara-Dunia. In A. H. Nugroho, Bambang Wahyu; & dan Rais (Ed.), *Theory Talks*. LP3M UMY.
- Sinclair, T. J. (2012). Tentang Kekuatan Sosial, Korporasi Transnasional dan Pemeintahan Global. In A. H. Nugroho, Bambang Wahtu; & dan Rais (Ed.), *Theory Talks*. UMY.
- Singh, J. . (2015). The power of diplomacy: new meanings, and the methods for understanding digital diplomacy. In *Digital Diplomacy : Theory and practice*. Routledge.
- Smith, Gordon:& Sutherland, A. (2002). The New Diplomacy: Real-Time Implications and Applications. In E. H. Potter (Ed.), *Cyber-Diplomacy Managing Foreign Policy in the Twenty-first Century* (pp. 154–155). McGill-Queen’s University Press.
- Stuart, M. (2006). *Reordering diplomatic theory for the twenty-first century: a tripartite approach*. Department of International Relations and Diplomacy Faculty of Humanities & Social Sciences, Bond University.



# NANO POWER DIPLOMACY

Study about Non-State Actors

Pertama bahwa pandemi covid-19 telah berdampak pada tata hubungan internasional dan tata kelola hubungan internasional, khususnya dalam praktik diplomasi dari platform on-site ke platform on-line. Fakta menunjukkan bahwa state actors melakukan migrasi tersebut secara serempak dan radikal. Seluruh kegiatan diplomasi dan hubungan internasional dilakukan secara daring. Sedangkan pada nonstate actors, netizen juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan publik asing serta membuat konten media yang sangat beragam. Kedua, terjadinya pergeseran paradigma dalam hubungan internasional, yakni terjadinya focus of international dalam studi hubungan internasional dari basis state actors ke basis nonstate actors, yang dikenal dengan multitrack diplomacy.

Jalur itu juga disebut dengan sembilan jalur diplomasi, yang terdiri atas satu jalur state actors dan delapan jalur lainnya berupa jalur non-state actors. Dalam kondisi tersebut, nano power diplomacy merupakan riset yang menempatkan individu sebagai unit terkecil dari diplomasi, sangat relevan untuk diangkat sebagai subject matter baru dalam studi hubungan internasional. Ketiga, bagaimana praktik diplomasi nano dalam hubungan internasional masih akan dilanjutkan pada tahun kedua. Dengan demikian belum dapat disimpulkan secara tegas. Hanya saja, praktik diplomasi netizen secara off line dapat disimpulkan bahwa netizen bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan jaringan di luar negeri menunjukkan peningkatan publikasi tentang kegiatan diplomasi nano sehingga diharapkan menginspirasi netizen lainnya untuk menjalankan diplomasi publik secara luas.



Sebelas Maret University Press  
Jl. Ir. Soekarno 35 A, Burungin, Surakarta 57126  
Telp. (0271) 645994 Fax. 341  
www.unspress.uns.ac.id

